PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG KAUGAPA DISTRIK MIMIKA TIMUR TAHUN 2025

"Membangun dari Kampung Ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota"



KATA PENGANTAR PENYUSUN

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyelenggaraan-Nya, proses penyusunan **Profil dan Potensi Kampung Kaugapa Distrik Mimika Timur** dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis mendukung akselerasi pembangunan kampung yang berorientasi pada data akurat dan informasi faktual hasil observasi serta pengumpulan data lapangan. Melalui proses yang sistematis, terverifikasi dan partisipatif, dokumen ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat bagi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan kampung secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Atas nama Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM), kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) atas kepercayaan yang diberikan kepada IPPM sebagai lembaga penyusun. Kepercayaan ini merupakan tanggungjawab besar yang kami emban dalam mendukung pembangunan kampung yang lebih terarah, partisipatif dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa proses penyusunan dokumen ini tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan, baik dalam pengumpulan data, mobilisasi ke lapangan, maupun koordinasi lintas pihak. Namun berkat kerja keras tim serta dukungan penuh dari berbagai pemangku kepentingan, seluruh tahapan dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan untuk menghasilkan dokumen yang komprehensif.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas PMK dan staf, Kepala Distrik Mimika Timur beserta seluruh staf, Kepala Kampung Kaugapa dan aparat kampung, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi, waktu dan bantuan selama proses pengumpulan data berlangsung. Kontribusi semua pihak menjadi bagian penting dalam keberhasilan penyusunan dokumen ini.

Kami juga sangat mengharapkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan dokumen pada tahap berikutnya. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan dan berkelanjutan demi terwujudnya pembangunan kampung di kabupatem Mimika yang lebih maju dan mandiri.

Jayapura, 15 Desember 2025
Direktur IPPM,

Yohannes Rahail

KATA PENGANTAR KEPALA KAMPUNG

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan penyertaan-Nya, Profil Kampung Kaugapa ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai upaya bersama Pemerintah Kampung Kaugapa dalam menghadirkan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, serta mencerminkan kondisi riil kehidupan masyarakat kampung.

Penyusunan Profil Kampung Kaugapa bertujuan untuk menggambarkan secara utuh kondisi kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta potensi dan permasalahan yang dihadapi kampung. Profil ini diharapkan menjadi basis data dan rujukan utama dalam proses perencanaan pembangunan kampung, penyusunan RPJM Kampung, RKP Kampung, serta sebagai bahan pendukung dalam musyawarah kampung dan koordinasi dengan pemerintah distrik dan kabupaten.

Dokumen Profil Kampung ini juga memiliki manfaat strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan tersedianya data yang valid dan mutakhir, Pemerintah Kampung Kaugapa dapat merancang program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran, berkeadilan, serta sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan penguatan ekonomi kampung.

Saya berharap Profil Kampung Kaugapa ini tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dimanfaatkan sebagai alat perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan kampung. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan mampu mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan kampung yang berkelanjutan, berbasis kearifan lokal, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat Kampung Kaugapa.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kampung Kaugapa ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan Kampung Kaugapa dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Mimika, 16 Desember 2025
Kepala Kampung Kaugapa,

Saverius Kapirapu

KATA PENGANTAR KEPALA DISTRIK

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat, penyertaan, dan tuntunan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Kaugapa** di wilayah Distrik Mimika Timur dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan langkah strategis dalam mengakselerasi pembangunan kampung yang berbasis pada data dan informasi faktual di lapangan, sehingga setiap perencanaan dan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

Penyusunan dokumen ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kapasitas Pemerintah Kampung, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi riil, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat kampung. Melalui Profil Kampung ini, diharapkan Pemerintah Distrik, Pemerintah Kampung, serta seluruh pemangku kepentingan memiliki rujukan yang jelas dan komprehensif dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan ke depan.

Atas tersusunnya dokumen ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah bekerja secara profesional sebagai tim penyusun. Dengan metodologi yang terstruktur, berbasis bukti, serta didukung oleh proses pengumpulan data lapangan yang komprehensif, IPPM telah menghasilkan dokumen yang tidak hanya informatif, tetapi juga relevan dan bermanfaat sebagai dasar perencanaan pembangunan kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta seluruh masyarakat Kampung Kaugapa di Distrik Mimika Timur yang telah memberikan dukungan, data, informasi, dan partisipasi aktif selama proses penyusunan dokumen ini berlangsung.

Semoga Dokumen Profil dan Potensi Kampung Kaugapa ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pijakan penting dalam mewujudkan pembangunan kampung yang mandiri, produktif, dan berkeadilan.

Mimika, 18 Desember 2025
Plt. Kepala Distrik Mimika Timur,

Bakri Athoriq, S.STP

SAMBUTAN KEPALA DINAS PMK MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaan-Nya, **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Kaugapa Distrik Mimika Timur** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mimika dalam memperkuat pembangunan kampung yang berbasis pada data yang akurat, informasi faktual serta pemetaan kebutuhan riil masyarakat di setiap wilayah.

Penyusunan dokumen ini merupakan wujud nyata kerja kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta mitra profesional yang berkompeten. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala Distrik Mimika Timur beserta jajaran, Kepala Kampung Kaugapa bersama seluruh aparat kampung, serta masyarakat Kampung Kaugapa yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan aktif selama proses pengumpulan dan verifikasi lapangan. Kontribusi ini sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi objektif dan dinamika nyata kampung.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) selaku tim penyusun. Melalui pendekatan metodologis yang terstruktur, IPPM telah melaksanakan proses penyusunan dokumen ini dengan observasi langsung, kajian analitis, serta verifikasi data secara berjenjang. Meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan tantangan lapangan, IPPM mampu menyelesaikan dokumen ini secara baik, akurat dan sesuai dengan kaidah penyusunan profil kampung. Dedikasi tersebut merupakan kontribusi penting dalam mendukung percepatan pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejalan dengan terbitnya dokumen ini, kami berharap penyusunan profil dan potensi kampung dapat diperluas dan direplikasi ke seluruh kampung di Kabupaten Mimika. Dengan tersedianya basis data kampung yang lengkap, mutakhir, dan terpadu, setiap kampung diharapkan mampu berkembang sebagai model perencanaan pembangunan berbasis data, serta menjadi rujukan dalam pengembangan inovasi, penguatan tata kelola pemerintahan kampung, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Dokumen Profil dan Potensi Kampung ini memiliki nilai strategis sebagai dasar perencanaan pembangunan, baik di tingkat kampung, distrik, maupun kabupaten. Data yang lengkap dan komprehensif akan menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan, penyusunan program dan kegiatan, serta penguatan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik lokal. Lebih dari itu, dokumen ini diharapkan dapat memperkuat identitas kampung serta membuka ruang pengembangan potensi unggulan yang berdaya saing.

Akhir kata, kami berharap agar dokumen ini terus diperbarui secara berkala dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini pada masa mendatang. Semoga kerja kolaboratif ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, berdaya saing, serta berkontribusi nyata bagi terwujudnya Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Kepala Dinas,

Abraham Y. Kateyau, SE., MH

SAMBUTAN BUPATI MIMIKA

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas penyelenggaraan dan penyertaan-Nya, Kabupaten Mimika terus berbenah dalam melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan "Membangun dari kampung ke kota", maka **Dokumen Profil dan Potensi Kampung Kaugapa** dapat diselesaikan sebagai salah satu langkah strategis dalam memperkuat arah pembangunan kampung di Kabupaten Mimika.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, arah pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan yang mendasar. Kebijakan Otonomi Khusus memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara lebih kontekstual, partisipatif, serta selaras dengan karakter sosial, budaya dan kondisi geografis masyarakat Papua.

Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, Pemerintah Pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua. Dokumen strategis ini menegaskan tiga pilar utama pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, sebagai upaya mempercepat transformasi pembangunan Papua secara menyeluruh dan berkelanjutan, sekaligus menjawab ketertinggalan kualitas sumber daya manusia yang bersifat struktural.

Dalam konteks Kabupaten Mimika, kita menyadari bahwa tantangan pembangunan masih bersifat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan antar wilayah masih nyata, terutama antara kawasan perkotaan yang berkembang pesat dengan kampung-kampung di wilayah pedalaman dan pesisir yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar. Kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kuatnya peran adat dan tradisi menjadi faktor penting yang memengaruhi dinamika pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat kampung.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat ditentukan oleh ketersediaan data dan informasi kampung yang akurat, lengkap dan mutakhir. Selama ini, basis data kampung yang terpadu belum sepenuhnya tersedia, sehingga perencanaan pembangunan sering kali belum didukung oleh landasan teknokratis yang kuat. Untuk itu penyusunan profil dan potensi kampung menjadi kebutuhan yang mendesak sebagai fondasi pembangunan yang objektif, terukur dan berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi pembangunan tahun 2024-2029, “Mewujudkan Mimika yang Responsif, Energik, Transparan, Terampil, Objektif dan Berdaya Saing menuju Gerbang Emas”, menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dimulai dari kampung dengan pendekatan **“**Membangun dari Kampung ke Kota, Membangun Kampung Rasa Kota.” Pendekatan ini menempatkan kampung sebagai titik awal pembangunan wilayah, dengan perencanaan yang komprehensif, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat. Penyusunan profil dan potensi kampung berbasis satu data merupakan langkah strategis dalam memperkuat implementasi pendekatan tersebut.

Pada kesempatan ini, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (IPPM) yang telah menjadi mitra Pemerintah Kabupaten Mimika dalam penyusunan dokumen ini. Dengan tersusunnya dokumen Profil dan Potensi Kampung Kaugapa ini, Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki landasan yang lebih kuat untuk mempercepat pembangunan kampung secara sistematis, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Data yang tersaji tidak hanya menjadi pijakan perencanaan, tetapi juga sarana untuk memperkuat identitas kampung, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta meningkatkan daya saing kampung secara berkelanjutan.

Akhir kata, saya berharap dokumen ini dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan dan terus diperbarui secara berkala. Semoga upaya ini menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan kampung-kampung di Kabupaten Mimika yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Mimika sebagai Gerbang Emas.

Timika, 19 Desember 2025
Bupati,

Johannes Rettob, S.Sos., MM

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar Penyusun ii
Kata Pengantar Kepala Kampung iii
Kata Pengantar Kepala Distrik iv
Sambutan Kepala Dinas PMK v
Sambutan Bupati Mimika vii
Daftar Isi x
Daftar Tabel xi
Daftar Gambar xii

Bagian I. **PENDAHULUAN** 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan 2
C. Manfaat 3
Bagian II. **METODOLOGI** 5
Bagian III. **PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG**..... 10
A. Keadaan Wilayah Kampung 10
1. Sejarah 10
2. Keadaan Wilayah 14
B. Keadaan Perumahan 17
1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah 17
2. Pola Permukiman 18
3. Kepemilikan Rumah 19
4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar 19
5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga 20
6. Kondisi Lingkungan Permukiman 21
7.Masalah utama dan Kebutuhan perumahan. 22
C. Kependudukan 23
1. Suku-suku di Kampung 23
2. Keadaan Penduduk 28
3. Migrasi dan Mobilitas Penduduk 36
D. Pendidikan 38
1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan 38
2. Kelembagaan Pendidikan 41
3. Keadaan Guru dan Murid 44
4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar 46
5. Pendidikan NonFormal 48
E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana 49

1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit …… 49
2. Kesehatan ……. 52
3. Gizi …….. 55
4. Keluarga Berencana ……. 57
F. Ekonomi Masyarakat 59
1. Aktivitas Penduduk …….. 59
2. Kepemilikan Modal ……. 60
3. Kelembagaan Ekonomi …… 60
4. Harga Barang dan Bahan Makanan ……. 61
5. Potensi dan Peluang Ekonomi …….. 62
6. Tingkat Kesejahteraan …….. 62
G. Keamanan dan Ketertiban 63
1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban …….. 63
2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban …….. 64
H. Kelembagaan Kampung 64
1. Lembaga pemerintah 64
2. Lembaga kemasyarakatan..... 66
3. Lembaga Politik 67
I. Sarana Prasana 67
1. Transportasi dan Komunikasi …….. 67
2. Air Bersih dan Sanitasi ……. 70
3. Penerangan / Energi ……. 73
4. Pendidikan ……... 73
5. Kesehatan ……. 74
6. Ekonomi ……... 75
7. Peribadatan …….. 75
8.Olahraga dan Rekreasi …….. 76
Bagian IV. **PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG** …….. 77
A. Infrastruktur Kampung Berstandar Kota 77
B. Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal 77
C. SDM, Budaya, dan Lingkungan Berkelanjutan 78
Bagian V. **PENUTUP** 79

Daftar Pustaka 80

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 3.1 Distribusi Penduduk kampung Kaugapa menurut Umur Tahun 2025.. 29

Tabel 3.2 Distribusi Penduduk Kampung Kaugapa menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025 31

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Kaugapa menurut Matapencaharian Tahun 2025 32

Tabel 3.4 Distribusi Penduduk Kampung Kaugapa menurut Agama Tahun 2025 35

Tabel 3.5 Jenis Lembaga Pendidikan Di Kampung Kaugapa Tahun 2025 41

Tabel 3.6 Distribusi Fasilitas Sekolah di Kaugapa Tahun 2025 42

Tabel 3.7 Distribusi Harga Bahan Pokok Kampung Kaugapa Tahun 2025 61

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota Di Kampung Kaugapa .. 77

Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal Di kampung Kaugapa 78

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan Di kampung Kaugapa 78

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Peta Titik Lokasi Kampung Kaugapa	9
Gambar 3.1	Struktur Pemerintahan Kampung Kaugapa	65
Ganbar 3.2	Struktur Bamuskam Kampung Kaugapa	65

BAGIAN I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (OTSUS) bagi Provinsi Papua yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, maka kebijakan pembangunan di Tanah Papua mengalami perubahan mendasar. Kebijakan ini memberikan ruang yang lebih luas bagi Papua, termasuk Kabupaten Mimika, untuk mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan secara kontekstual dan partisipatif sesuai karakteristik sosial, budaya dan geografis daerah.

Sebagai kelanjutan dari kebijakan Otonomi Khusus tersebut, pemerintah pusat menetapkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). RIPPP menekankan tiga (3) pilar utama pembangunan yakni "Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif". Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempercepat transformasi pembangunan yang berpihak pada rakyat Papua secara responsive, menyeluruh dan berkelanjutan, dengan mengatasi ketertinggalan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua yang selama ini terjadi secara struktural dan sistemik.

Di Kabupaten Mimika, tantangan pembangunan masih sangat kompleks dan multidimensional. Ketimpangan pembangunan antar wilayah masih tinggi, terutama antara daerah perkotaan yang relatif maju dengan kampung-kampung di pedalaman dan wilayah pinggiran yang masih tertinggal (dataran pesisir dan pegunungan). Kondisi geografis yang sulit, rendahnya akses terhadap pelayanan dasar, keterbatasan infrastruktur, dan kuatnya keterikatan masyarakat terhadap norma-norma adat dan tradisi lokal turut mempengaruhi lambatnya proses peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan kabupaten Mimika sangat bergantung pada kemampuan memahami potensi dan permasalahan kampung secara lebih mendalam, faktual dan berbasis data yang akurat. Namun hingga saat ini belum tersedia satu basis data kampung yang lengkap, terpadu dan terbarukan yang dapat digunakan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan kampung secara objektif, terukur dan berkelanjutan.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Mimika melalui visi-misi pembangunan tahun 2025-2029 adalah Mewujudkan Mimika yang responsif, energik, transparan, terampil, objektif dan berdaya saing menuju Gerbang Emas (Gerakan Kebangkitan Ekonomi Masyarakat Adil dan Sejahtera), telah menetapkan arah kebijakan "Membangun dari Kampung ke Kota", dengan pendekatan "Membangun Kampung Rasa Kota". Pendekatan ini memprioritaskan pembangunan yang berbasis wilayah, komprehensif, partisipatif dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat. Salah satu langkah strategis untuk mendukung implementasi pendekatan tersebut adalah menyusun profil dan potensi kampung berbasis kontekstual kampung di kabupaten Mimika.

Dengan adanya basis data kampung yang komprehensif dan selalu diperbarui, Pemerintah Kabupaten Mimika dapat menyelenggarakan pembangunan kampung secara lebih sistematis, terukur dan berkelanjutan. Data ini berfungsi sebagai pijakan teknokratis yang kuat, sekaligus membuka ruang kolaborasi antar-lembaga serta memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat kampung dalam merumuskan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan riil dan potensi lokal.

Selanjutnya, basis data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai media *branding* kampung, sehingga tiap wilayah memiliki ruang untuk menonjolkan keunikan dan potensi khasnya baik dalam aspek ekonomi, sosial-budaya, maupun pengelolaan sumber daya alam. Dengan demikian pembangunan kampung di Kabupaten Mimika tidak hanya sebatas upaya pemerataan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat daya saing lokal yang berakar pada identitas masing-masing kampung.

Melalui kegiatan penyusunan profil dan potensi kampung yang terintegrasi dalam basis data tersebut, diharapkan terbangun pijakan yang kokoh menuju terwujudnya kampung yang mandiri, produktif dan berdaya saing. Upaya ini merupakan bagian dari gerakan besar untuk mewujudkan Kabupaten Mimika sebagai "Gerbang Emas", yakni kabupaten yang sehat, cerdas dan sejahtera, dengan masyarakat serta keluarga yang berkualitas.

B. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini, adalah:

1. Mengidentifikasi dan memetakan kondisi riil kampung secara menyeluruh, mencakup aspek kependudukan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan dan infrastruktur;
2. Menggali potensi sumber daya lokal yang dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi dan daya saing kampung;
3. Menyediakan data dasar yang akurat dan terintegrasi sebagai bahan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi program pembangunan kampung;
4. Menjadi fondasi untuk pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat kampung.

C. Manfaat

Penyusunan dokumen profil dan potensi kampung ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pemerintah
   a. Penyediaan data akurat dan terpadu berbasis kampung
      Memberikan basis data yang lengkap, mutakhir dan terintegrasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan program pembangunan kampung secara obyektif dan terukur.
   b. Perencanaan pembangunan yang tepat sasaran
      Memungkinkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat kampung berdasarkan kondisi dan potensi riil di lapangan.
   c. Penguatan tata kelola pemerintahan kampung
      Meningkatkan kapasitas pemerintah kampung dan distrik dalam menjalankan fungsi administratif, pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya secara lebih efisien dan transparan berbasis data
   d. Mempercepat pelaksanaan program strategis daerah dan nasional
      Mendukung pencapaian visi pembangunan daerah 2025-2030 (Gerbang Emas) serta program nasional seperti RIPPP (Papua sehat, cerdas dan produktif) melalui intervensi yang berbasis data dan spasial.
   e. Mendukung sistem monitoring dan evaluasi pembangunan berbasis bukti

Menyediakan alat ukur dan indikator yang valid untuk memantau capaian pembangunan kampung secara berkala dan berkelanjutan.

2. Masyarakat
   a. Peningkatan akses terhadap program dan layanan publik

      Masyarakat akan lebih mudah teridentifikasi dan terakomodasi dalam program pembangunan karena pemerintah memiliki data yang jelas tentang kondisi dan kebutuhan mereka.

   b. Pemberdayaan berbasis potensi lokal

      Masyarakat akan lebih terdorong mengembangkan potensi kampung (SDA, budaya dan ekonomi lokal) sebagai basis pemberdayaan dan kemandirian.

   c. Partisipasi aktif dalam pembangunan

      Dengan keterlibatan langsung dalam proses pendataan dan pemetaan, masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap pembangunan yang dilakukan.

   d. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan kampung

      Data yang terbuka dan mudah diakses akan meningkatkan kesadaran kritis masyarakat bagi proses pembangunan dan mendorong kontrol sosial yang sehat.

   e. Percepatan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup

      Dengan adanya intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran, masyarakat akan memperoleh manfaat nyata seperti peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar.

BAGIAN II. METODOLOGI

Metodologi penyusunan Profil Kampung Kaugapa dirancang untuk menjamin bahwa data dan informasi yang dihasilkan bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, partisipatif, serta relevan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan kampung, distrik dan kabupaten. Pendekatan metodologis ini mengacu pada prinsip perencanaan pembangunan berbasis data, partisipasi masyarakat dan sinkronisasi lintas sektor sesuai kerangka perencanaan Pemerintah Kabupaten Mimika.

A. Pendekatan dan Metode Penyusunan

Penyusunan Profil Kampung Kaugapa menggunakan metode deskriptif dengan memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi riil kampung, baik dari sisi data objektif maupun dinamika sosial, budaya, kelembagaan, serta potensi sumber daya lokal.

Pendekatan yang digunakan meliputi:

1. Pendekatan partisipatif

   Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat kampung sebagai subjek pembangunan melalui pelibatan aktif aparat kampung, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda serta unsur masyarakat lainnya. Pelibatan ini dilakukan dalam proses pengumpulan, klarifikasi dan pembahasan data agar profil kampung mencerminkan kondisi riil dan aspirasi masyarakat.

2. Pendekatan berbasis data primer dan sekunder

   Penyusunan profil kampung memadukan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah kampung, distrik dan perangkat daerah. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kelengkapan, ketepatan serta konsistensi data.

3. Validasi melalui FGD Kampung

   Seluruh data dan informasi yang dihimpun dilakukan proses validasi melalui FGD tingkat kampung sebagai forum klarifikasi, penyepakatan dan penguatan legitimasi data secara sosial dan administratif.

B. Prinsip Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Kaugapa dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Spesifik, yaitu data yang dihimpun mampu menggambarkan indikator pembangunan kampung secara jelas dan terarah sesuai konteks lokal.
2. Dapat dipercaya, yaitu seluruh proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dilakukan secara bertanggung jawab dan terukur agar mencerminkan kondisi sebenarnya.
3. Dapat diukur, yaitu data disusun berdasarkan konsep, definisi, klasifikasi, dan satuan ukuran yang merujuk pada standar yang diakui sehingga memungkinkan perbandingan antar waktu.
4. Relevan, yaitu data yang dikumpulkan memiliki nilai guna langsung bagi perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan kampung.
5. Berkelanjutan, yaitu data disusun dengan prinsip pemutakhiran berkala agar Profil Kampung selalu mencerminkan kondisi aktual.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan Profil Kampung Kaugapa meliputi:

1. Data administrasi kampung, antara lain data kependudukan, kelembagaan kampung, sarana dan prasarana, serta dokumen perencanaan dan laporan kampung.
2. Data Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dari:
   a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
   b. Kantor Badan Pusat Statistik (BPS)
   c. Data statistik wilayah Kabupaten Mimika dan Distrik Mimika Timur.
3. Observasi lapangan dan wawancara narasumber kunci, yang digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sosial, budaya, ekonomi, lingkungan serta potensi dan permasalahan kampung yang belum sepenuhnya tercakup dalam data administratif.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Data sekunder

   Teknik pengumpulan data dalam penyusunan Profil Kampung Kaugapa dilaksanakan dengan memanfaatkan data sekunder resmi yang telah tersedia dan terpublikasi resmi, khususnya untuk kebutuhan data dasar kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat.

   Pengumpulan data dilakukan melalui pemanfaatan Data Agregat Kependudukan Semester- I Tahun 2025 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika**.** Data tersebut digunakan untuk menghimpun informasi mengenai jumlah dan struktur penduduk, karakteristik sosial dasar, tingkat pendidikan, serta indikator kependudukan lainnya yang relevan dengan kebutuhan penyusunan profil kampung.

   Pemanfaatan data sekunder resmi ini dilakukan dengan pertimbangan keterbatasan dan belum optimalnya validitas data hasil pendataan langsung di lapangan. Untuk itu penggunaan data agregat Dukcapil dipandang sebagai sumber data yang paling andal, terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dalam mendukung penyusunan Profil Kampung Kaugapa.

2. Data primer
   a. Wawancara Mendalam, yang ditujukan kepada informan kunci seperti aparat kampung, tokoh adat, tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
   b. Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan unsur pemerintah kampung dan perwakilan masyarakat untuk menggali informasi kualitatif, mengidentifikasi isu strategis, serta merumuskan potensi dan kebutuhan prioritas kampung.

Setelah pengumpulan data sekunder dan primer, dilakukan verifikasi silang data sebagai proses pencocokan dan pengecekan data antar sumber, baik antara data lapangan dan data administratif maupun antar OPD, guna memastikan konsistensi dan keandalan data.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar menghasilkan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai kondisi Kampung Kaugapa.

Data kuantitatif dianalisis melalui tabulasi dan pengelompokan indikator pembangunan sehingga dapat menggambarkan distribusi, kecenderungan, dan proporsi setiap variabel secara terukur. Data kualitatif dianalisis secara deskriptif melalui tahapan identifikasi, kategorisasi, dan penafsiran untuk menangkap makna, dinamika sosial, serta konteks lokal yang melatarbelakangi data numerik.

F. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan

Penyusunan Profil Kampung Kaugapa dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2025, meliputi tahapan persiapan, pengumpulan data lapangan dan validasi, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan dokumen profil kampung.

Wilayah cakupan penyusunan meliputi wilayah Kampung Kaugapa, Distrik Mimika Timur, termasuk kawasan permukiman, wilayah pesisir, serta area aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kampung.

136°49'0"E

4°40'0"S



136°49'0"E

INSTITUT PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PAPUA

PETA TITIK LOKASI KAMPUNG KAUGAPU DISTRIK MIMIKA TIMUR KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

U
B T
S

Skala 1:10.000

0 0,1 0,2 0,4 0,6 Km

Keterangan :

X : 136° 49' 8,982" E

Y : 4° 40' 20,912" S

Titik Kampung

Titik Kampung Lain

Kantor Distrik

Datum : WGS 1984
Proyeksi : UTM Zona 54 S
Sistem Kordinat : Geografis dan UTM
Sumber : Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)

Inset Peta



Lokasi Pemetaan

BAGIAN III. PROFIL DAN POTENSI KAMPUNG

A. Keadaan Wilayah Kampung

1. Sejarah

a. Asal-usul kampung

Penduduk asli Kampung Kaugapa adalah suku **Kapaowe** yang sudah ada sejak dahulu dan menghuni daerah pemukiman yang disebut dengan kampung lama yang berbatasan dengan Kampung Hiripau. Kapaowe dalam bahasa Kaugapa artinya orang yang tinggal di hutan. Nama asli Kampung Kaugapa adalah Kampung ***Kapu-kapu*** yang diberi nama oleh moyang leluhur suku Kapawe yang artinya tanah/dusun. Pada tahun 1950 an pemerintah kolonial Belanda masuk Kampung lalu mengubah nama Kampung menjadi Kaugapa sampai sekarang.


Gapura kampung Kaugapa (Dok.ippm)

b. Struktur sosial awal

Masyarakat asli Kampung Kaugapa berasal dari suku Kapaowe yang hingga saat ini masih eksis dan menetap secara turun-temurun di wilayah Kampung. Keberadaan masyarakat adat tersebut ditandai oleh sejumlah marga asli**,** antara lain Mametapo, Yemaro, Yapurao, Tayaro, Epoko, Yawa, Wapuku, Baratowau, Kapirapu, Maira, Inawouw, Paipa, Upaewa, Mupiyu, Makarkame, Wapa, Kaugapaka, Tawapowau dan Tawou. Marga-marga ini tidak hanya mencerminkan identitas genealogis, tetapi juga menjadi dasar ikatan sosial, penguasaan wilayah adat, serta pengaturan hubungan kekerabatan dalam kehidupan masyarakat Kampung Kaugapa.

Dalam sistem sosial adat, kepemimpinan masyarakat Kampung Kaugapa dipimpin oleh seorang kepala suku yang memiliki peran sentral dalam menjaga tatanan adat, menyelesaikan persoalan sosial, serta memimpin pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama masyarakat adat. Kepala suku berfungsi sebagai simbol persatuan dan penjaga nilai-nilai kearifan lokal yang

diwariskan secara turun-temurun, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat adat dengan struktur pemerintahan formal kampung.

Pada masa awal pemukiman, masyarakat Kampung Kaugapa hidup dalam pola hunian tradisional yang sangat menyatu dengan lingkungan alam sekitarnya. Rumah-rumah dibangun menggunakan bahan lokal berupa gabah-gabah atau pelepah sagu dengan atap dari daun rumbai, sejalan dengan kondisi geografis kampung yang dikelilingi oleh hamparan lahan sagu yang luas. Pola kehidupan masyarakat pada fase awal ditopang oleh sistem penghidupan subsisten, yaitu berkebun, berburu dan meramu, yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam serta menjadi fondasi budaya masyarakat Kampung Kaugapa hingga saat ini.

c. Perkembangan kampung dari masa ke masa

Pada masa awal, penduduk Kampung Kaugapa bermukim di wilayah kampung lama yang dihuni oleh sekitar 37 kepala keluarga**.** Permukiman tersebut menjadi pusat kehidupan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat adat pada periode awal pembentukan kampung. Pola kehidupan masyarakat saat itu masih sangat bergantung pada alam dan berlangsung dalam struktur sosial yang sederhana namun kuat berbasis kekerabatan dan adat istiadat setempat.

Perkembangan penting terjadi pada tahun 1927**,** ketika gereja Katolik melalui misionaris mulai masuk ke Kampung Kaugapa. Kehadiran gereja ditandai dengan pembangunan Gereja Katolik Santo Joseph serta Sekolah Dasar YPPK Santo Rafael**,** yang menjadi tonggak awal perubahan dalam bidang keagamaan dan pendidikan masyarakat. Salah satu peristiwa bersejarah yang hingga kini dikenang adalah pidato Pastor Deckmas pada tahun 1965**,** yang menyampaikan pandangan visioner bahwa Kampung Kaugapa kelak akan berkembang menjadi sebuah kota besar. Pernyataan tersebut memberikan makna simbolik bagi masyarakat dalam memandang masa depan kampung.


Lokasi kampung lama (Dok.ippm)

Pada tahun 1930**,** Kampung Kaugapa juga mengalami dinamika sejarah dengan masuknya kolonial Jepang**.** Pada masa ini dilakukan pembukaan lahan-

lahan pertanian yang dipimpin oleh seorang perempuan bernama Ibu Akiko, sebagai bagian dari upaya pengembangan produksi pangan. Namun, keberadaan Jepang di wilayah ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 1943, pasukan Jepang meninggalkan Kampung Kaugapa setelah pasukan Sekutu menjatuhkan bom di wilayah Timika Pantai, yang berdampak langsung terhadap situasi keamanan di kawasan sekitar.

Selanjutnya pada tahun 1950, pemerintah kolonial Belanda masuk ke Kampung Kaugapa dan membuka lahan pertanian untuk pengembangan tanaman karet, baik di Kampung Kaugapa maupun di wilayah Hiripau. Pada periode ini setiap kepala keluarga memperoleh 500 bibit pohon karet untuk ditanam pada lahan seluas sekitar satu hektar, yang membentang sepanjang aliran sungai Wania hingga Kampung Mware. Program ini menandai pengenalan sistem pertanian terencana dan komoditas perkebunan bagi masyarakat setempat.

Memasuki tahun 1960, pemerintah Indonesia hadir di Kampung Kaugapa dan menyampaikan secara resmi kepada masyarakat bahwa Indonesia telah merdeka. Pada masa tersebut, situasi sosial masih diliputi kewaspadaan, di mana Masyarakat baik orang tua maupun anak-anak telah mempersiapkan alat perang tradisional berupa busur dan panah untuk mempertahankan wilayah adat dari pihak luar. Namun, atas permintaan aparat militer Indonesia di bawah pimpinan Tentara Thomas dan Tikno, seluruh alat perang tersebut kemudian dikubur di wilayah kampung lama sebagai simbol penerimaan terhadap pemerintahan baru dan komitmen menjaga perdamaian.

Perubahan demografis yang signifikan mulai terjadi pada tahun 1985, ketika pemerintah Indonesia mengirimkan transmigrasi pertama dari Pulau Jawa ke wilayah Mimika, khususnya di kawasan SP 1 dan SP 2. Peristiwa ini menjadi titik awal masuknya penduduk pendatang ke Kampung Kaugapa, yang terus berlangsung hingga saat ini dan turut membentuk dinamika sosial, ekonomi, serta keberagaman penduduk dalam kehidupan kampung.

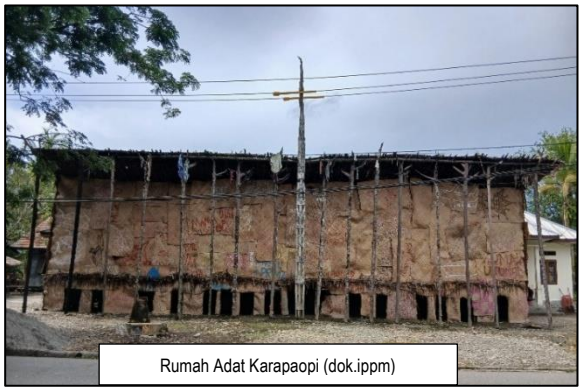
d. Nilai dan kearifan lokal

Masyarakat Kampung Kaugapa memiliki rumah adat yang menjadi simbol utama kearifan lokal dan identitas budaya mereka, yaitu rumah adat Karapao, yang dalam sebutan masyarakat setempat dikenal dengan nama *Karapaopi*. Istilah *pi* dalam bahasa Kaugapa berarti *rumah*, sehingga Karapaopi dimaknai sebagai rumah

adat yang memiliki kedudukan penting dalam struktur sosial dan budaya masyarakat kampung. Keberadaan rumah adat ini tidak hanya berfungsi sebagai bangunan fisik, tetapi juga sebagai pusat aktivitas adat dan ruang pemersatu masyarakat.

Rumah adat Karapaopi berperan sebagai tempat pelaksanaan ritual dan upacara adat kampung yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun, khususnya pada bulan Maret**.** Ritual adat tersebut merupakan bagian dari tradisi turun-temurun yang dijaga dan diwariskan oleh para tetua adat kepada generasi berikutnya. Pelaksanaan ritual di rumah adat menegaskan peran Karapaopi sebagai ruang sakral yang menghubungkan nilai-nilai budaya, kepercayaan, serta kehidupan sosial masyarakat Kampung Kaugapa.

Salah satu makna penting dari ritual adat yang dilaksanakan di Karapaopi adalah harapan bagi anak-anak dan remaja agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Ritual ini secara khusus ditujukan kepada generasi muda dengan tujuan simbolik agar mereka cepat bertumbuh, menjadi lebih kuat, dan bertambah tinggi**,** baik secara fisik maupun kedewasaan sosial. Tradisi ini mencerminkan perhatian masyarakat Kampung Kaugapa terhadap proses tumbuh kembang generasi penerus, sekaligus menjadi bentuk pendidikan budaya yang memperkuat identitas dan keberlanjutan nilai-nilai adat dalam kehidupan kampung.



Rumah Adat Karapaopi (dok.ippm)

e. Identitas kampung saat ini

Masyarakat Kampung Kaugapa memiliki identitas budaya yang kuat dan khas sebagai bagian dari suku asli Kapawe yang secara turun-temurun mendiami wilayah kampung. Keberadaan suku Kapawe menjadi landasan utama pembentukan jati diri masyarakat, yang tercermin dalam sistem nilai, pola kehidupan sosial, serta ikatan kekerabatan yang masih terpelihara hingga saat ini. Identitas kesukuan tersebut berfungsi sebagai perekat sosial yang menjaga kesinambungan budaya dan solidaritas antar warga kampung.

Selain identitas kesukuan, masyarakat Kampung Kaugapa juga memiliki bahasa asli Kaugapa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam

interaksi sosial, kegiatan adat dan ritual tradisional. Bahasa ini tidak hanya berperan sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai wahana pewarisan pengetahuan lokal, nilai budaya, serta sejarah kampung dari generasi ke generasi. Keberlanjutan penggunaan bahasa asli menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga eksistensi budaya lokal di tengah dinamika perubahan sosial.

Ciri khas budaya lainnya tercermin dalam lagu-lagu tradisional serta tarian semut, yang dikenal sebagai tarian tradisional Kampung Kaugapa. Tarian ini kerap ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat dan perayaan kampung sebagai bentuk ekspresi seni dan simbol kebersamaan masyarakat. Melalui lagu dan tarian tradisional tersebut, masyarakat Kampung Kaugapa menegaskan identitas kulturalnya sekaligus memperkuat rasa kebanggaan terhadap warisan budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial dan adat kampung.



2. Keadaan Wilayah

a. Letak geografis

Kampung Kaugapa terletak di wilayah Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Secara geografis, Kampung Kaugapa terletak pada koordinat 4°40'19.88"S, 136°49'10.43"T (Balai Kampung) dengan batas-batas wilayah secara administratif sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Iwaka
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Tipuka
- Sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Wania
- Sebelah barat berbatasan dengan Kampung Hiripau

b. Luas wilayah dan pembagian zona

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika, luas wilayah Kampung Kaugapa mencapai 38 km² atau setara dengan 3.800 hektare**.** Wilayah kampung ini tersusun atas beberapa zona pemanfaatan ruang yang saling terintegrasi, dengan zona hutan sebagai kawasan dominan**.** Selain itu, terdapat zona permukiman yang berkembang mengikuti alur poros jalan raya, zona pertanian dan perkebunan yang berada di belakang permukiman hingga berbatasan dengan

kawasan hutan, zona perairan yang dialiri oleh Kali Wania dan Kali Kauga, zona rawa-rawa yang menjadi habitat utama pohon sagu, serta zona tanah ulayat yang memiliki nilai sosial dan adat yang kuat bagi masyarakat setempat.

Pemanfaatan ruang di Kampung Kaugapa tidak hanya diperuntukkan bagi permukiman penduduk, tetapi juga mendukung berbagai aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Lahan kampung dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, serta dilengkapi dengan fasilitas umum seperti MCK, halte, jalan raya, sentra perdagangan berupa kios, tempat ibadah, dan lapangan sepak bola yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Keberadaan fasilitas tersebut mencerminkan upaya bertahap dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan dasar bagi warga kampung.

Dominasi kawasan hutan memberikan manfaat yang sangat signifikan, baik bagi masyarakat Kampung Kaugapa maupun bagi lingkungan secara luas. Secara ekologis, hutan berfungsi sebagai penyangga kehidupan yang menjaga keseimbangan ekosistem, mengatur tata air, mencegah banjir dan longsor, serta menjadi habitat bagi keanekaragaman hayati. Dari sisi ekonomi, kawasan hutan menyediakan sumber penghidupan melalui hasil hutan kayu maupun nonkayu, seperti sagu, rotan, madu, buah-buahan hutan, serta tanaman obat yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Selain itu, hutan memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi karena menjadi ruang hidup yang menopang kearifan lokal, adat istiadat, serta identitas masyarakat kampung. Dari aspek kesehatan dan iklim, kawasan hutan berperan dalam menjaga kualitas udara, menciptakan lingkungan yang sejuk dan sehat, serta berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim melalui kemampuan menyerap karbon. Dengan pengelolaan yang bijak dan berkelanjutan, Kampung Kaugapa sebagai kampung berbasis zona hutan memiliki potensi besar untuk berkembang tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan alamnya.

c. Kondisi topografi dan geomorfologi

Wilayah Kampung Kaugapa merupakan dataran rendah yang dikelilingi oleh hamparan hutan sagu yang dialiri dua sungai yaitu Sungai Wania yang mengalir di tengah-tengah kampung dan sungai kauga yang mengalir di sepanjang perbatasan Kampung Kauga dengan wilayah SP 5 Distrik Iwaka. Potensi rawan bencana yang

sewaktu-waktu dapat terjadi di Kampung Kaugapa adalah bencana banjir karena luas areal hutan rawa yang cukup luas dan adanya sungai wania dan kauga.


Sungai Wania (dok.ippm)

Daerah dengan topografi dan geomorfologi dataran rendah memiliki berbagai manfaat penting bagi kehidupan manusia dan pembangunan wilayah. Secara ekonomi, dataran rendah umumnya sangat cocok untuk kegiatan pertanian dan perkebunan karena permukaannya relatif datar, tanahnya subur, serta mudah diolah dan diairi. Secara permukiman, kondisi lahan yang landai memudahkan pembangunan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur seperti jalan, jembatan, serta jaringan utilitas dengan biaya yang lebih rendah. Secara transportasi dan aksesibilitas, dataran rendah memungkinkan mobilitas barang dan manusia berlangsung lebih lancar. Selain itu, secara sosial, wilayah dataran rendah cenderung berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan karena mudah dijangkau dan mendukung konsentrasi penduduk. Dengan perencanaan tata ruang yang baik, dataran rendah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

d. Iklim dan kondisi alam

Kampung Kaugapa yang terletak di Distrik Mimika Timur, memiliki tipe iklim tropis lembap yang merupakan ciri khas wilayah dataran rendah Papua. Kondisi iklim ini ditandai oleh curah hujan yang tinggi sepanjang tahun**,** suhu udara yang relatif hangat, serta tingkat kelembapan udara yang cukup tinggi. Karakteristik tersebut sangat dipengaruhi oleh posisi geografis Kampung Kaugapa yang berada di kawasan pesisir dan berdekatan dengan bentang alam hutan hujan tropis**.**

Pola curah hujan di Kampung Kaugapa menunjukkan intensitas yang cenderung merata sepanjang tahun, dengan puncak hujan terjadi pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan kondisi iklim di wilayah Distrik Mimika Timur, curah hujan rata-rata pada bulan Desember mencapai sekitar 715 mm**,** yang mencerminkan tingginya intensitas hujan pada periode tersebut. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama dalam sektor pertanian, pemanfaatan lahan, serta pola mobilitas dan kehidupan sehari-hari.

Secara umum, karakter iklim tropis lembap di Kampung Kaugapa memberikan dukungan terhadap keberlanjutan ekosistem alam, khususnya vegetasi sagu dan tanaman khas dataran rendah Papua. Namun pada sisi lain, curah hujan yang tinggi dan kelembapan udara yang besar juga memerlukan penyesuaian dalam perencanaan pembangunan kampung, terutama terkait infrastruktur, permukiman, dan pengelolaan lingkungan agar tetap berkelanjutan dan sesuai dengan kondisi alam setempat.

B. Keadaan Perumahan

1. Tipe dan Kondisi Bangunan Rumah

Keadaan perumahan penduduk di Kampung Kaugapa pada tahun 2025 sebagian besar sudah berbentuk bangunan permanen dengan berdinding tembok dan beratap seng, hanya sebagian kecil yang masih berbentuk semi permanen dan tradisional. Total rumah di Kampung Kaugapa berjumlah 238 rumah yang dihuni oleh 479 kepala keluarga (KK). Dari jumlah tersebut terdapat 103 rumah yang masuk dalam kategori tidak layak huni.

Tinggal di rumah yang tidak layak huni menimbulkan berbagai dampak serius bagi penghuni maupun lingkungan sekitar. Dari sisi kesehatan, kondisi rumah yang rusak, lembap, ventilasi buruk dan sanitasi tidak memadai dapat memicu penyakit seperti ISPA, diare, penyakit kulit, serta meningkatkan risiko penularan penyakit menular. Dari sisi keselamatan, struktur bangunan yang rapuh meningkatkan risiko kecelakaan, seperti atap runtuh, kebakaran, atau tersengat listrik. Dari sisi sosial dan psikologis, hunian yang tidak layak dapat menurunkan kenyamanan, rasa aman, dan martabat penghuni, bahkan memicu stres serta menurunkan kualitas hidup. Dari sisi lingkungan, rumah tidak layak huni sering kali berdampak pada lingkungan kumuh, pencemaran dan tata ruang yang tidak tertata. Secara keseluruhan, kondisi ini menghambat kesejahteraan masyarakat dan menegaskan pentingnya penyediaan rumah layak huni sebagai kebutuhan dasar manusia.



Rumah sangat sederhana (dok.ippm)

2. Pola Permukiman

Pemukiman penduduk Kampung Kaugapa menyebar mengikuti poros jalan raya mulai dari gapura masuk kampung yang berbatasan dengan Kelurahan Wania hingga sebelah barat yang berbatasan dengan Kampung Hiripau, kecuali pemukiman warga RT 05 agak jauh posisi nya dari poros jalan utama yang berjarak kurang lebih 200 meter. Pemukiman yang berkembang mengikuti poros jalan raya memiliki beragam dampak, baik positif maupun negatif, bagi masyarakat dan lingkungan. Dampak positifnya, pola ini memudahkan aksesibilitas dan mobilitas penduduk terhadap transportasi, pasar, sekolah, layanan kesehatan, dan pusat pemerintahan.

Aktivitas ekonomi lokal juga cenderung tumbuh lebih cepat karena rumah sekaligus dapat berfungsi sebagai tempat usaha, seperti kios atau jasa. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar (listrik, air dan telekomunikasi) lebih mudah dan efisien karena terpusat di sepanjang jalur jalan. Namun, terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan. Kepadatan bangunan di sepanjang jalan raya dapat meningkatkan kemacetan, kebisingan, dan polusi udara akibat lalu lintas kendaraan. Risiko kecelakaan lalu lintas juga lebih tinggi, terutama bagi anak-anak dan pejalan kaki. Dari sisi tata ruang, pemukiman linear dapat menyebabkan perkembangan wilayah yang tidak teratur dan mengurangi ruang terbuka hijau. Selain itu, jarak pelayanan ke wilayah belakang jalan bisa menjadi kurang merata. Untuk itu pemukiman yang mengikuti poros jalan raya perlu diatur melalui perencanaan tata ruang yang baik, seperti pengaturan sempadan jalan, zonasi fungsi lahan dan penyediaan fasilitas keselamatan, agar manfaatnya maksimal dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.

Di kampung Kaugapa jarak antar rumah cukup luas rata-rata 5-10 meter, sementara itu jarak rumah ke jalan raya kurang lebih 10-15 meter dan semua terjangkau dengan jaringan listrik PLN. Jarak antar rumah yang berjauhan memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan masyarakat, terutama di wilayah kampung atau perdesaan. Dari sisi kesehatan, jarak yang cukup antar rumah memungkinkan sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang baik, sehingga mengurangi risiko penularan penyakit. Dari sisi lingkungan, ruang terbuka di antara rumah dapat dimanfaatkan sebagai kebun, lahan pertanian, atau area resapan air yang membantu mencegah banjir**.** Dari sisi kenyamanan dan sosial, jarak rumah yang berjauhan menciptakan suasana yang lebih tenang, mengurangi kebisingan, serta

memberikan privasi bagi setiap keluarga. Selain itu, dari sisi keamanan, jarak antar rumah dapat mengurangi risiko kebakaran merambat dengan cepat. Dengan pengelolaan yang tepat, pola permukiman berjauhan dapat mendukung kualitas hidup yang sehat dan harmonis.

3. Kepemilikan Rumah

Kondisi perumahan di Kampung Kaugapa pada umumnya berupa rumah milik sendiri atau rumah pribadi yang dibangun atas inisiatif dan usaha mandiri masing-masing warga. Pola kepemilikan rumah ini mencerminkan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal, sekaligus menunjukkan kuatnya ikatan warga dengan tanah dan lingkungan tempat mereka bermukim. Rumah-rumah tersebut dibangun secara bertahap sesuai kemampuan ekonomi keluarga, dengan memanfaatkan bahan bangunan yang tersedia dan mudah diakses di wilayah kampung.

Selain rumah yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat, pemerintah melalui program perumahan nasional juga pernah memberikan dukungan berupa pembangunan rumah bantuan bagi warga Kampung Kaugapa. Namun demikian, jumlah rumah bantuan tersebut masih terbatas hanya sebanyak 10 unit**,** sehingga belum sepenuhnya menjangkau seluruh kebutuhan perumahan masyarakat. Namun kkehadiran rumah bantuan ini tetap memberikan kontribusi positif, khususnya bagi keluarga yang membutuhkan hunian layak, meskipun skalanya masih relatif kecil.

Di samping perumahan milik masyarakat, Kampung Kaugapa juga memiliki rumah adat *Karapao***,** yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat pada saat pelaksanaan acara ritual adat. Rumah adat ini memiliki fungsi sosial dan budaya yang penting sebagai tempat pelaksanaan kegiatan adat dan simbol kebersamaan warga kampung. Keberadaan rumah adat Karapao memperkuat identitas budaya Kampung Kaugapa serta mencerminkan nilai solidaritas dan partisipasi kolektif yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini.

4. Luas Bangunan dan Jumlah Kamar

Luas bangunan rumah rata-rata penduduk Kampung Kaugapa Adalah 7 x 6 meter standar rumah program nasional, tetapi ada juga rumah yang ukurannya lebih luas dan lebih kecil dari ukuran standar yaitu 5 x 6 meter. Rata-rata setiap rumah memiliki 2-3 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur dan 1 kamar mandi.

Tinggal di rumah berukuran 7 × 6 meter (± 42 m²) memiliki dampak positif dan negatif, tergantung jumlah penghuni, desain rumah, serta pengelolaannya. Dampak

positifnya, rumah kecil tentu saja lebih hemat biaya pembangunan dan perawatan, penggunaan listrik dan air cenderung lebih efisien, serta lebih mudah dibersihkan. Jika ditata dengan baik, rumah berukuran ini dapat terasa nyaman dan fungsional, terutama untuk keluarga kecil.

Namun, terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan. Jika jumlah penghuni cukup banyak, rumah berukuran kecil dapat menimbulkan kepadatan ruang, kurangnya privasi dan menurunnya kenyamanan. Ventilasi dan pencahayaan yang kurang baik berpotensi berdampak pada kesehatan, seperti sirkulasi udara buruk dan kelembapan tinggi. Dari sisi psikologis, ruang yang sempit dapat memicu stres dan ketegangan antar penghuni. Selain itu, keterbatasan ruang juga membatasi aktivitas dan fungsi ruangan.


Rumah Tipe Sederhana (dok.ippm)

5. Ketersediaan Fasilitas Dasar Rumah Tangga

Akses air bersih yang tersedia di Kampung Kaugapa berupa sumur bor baik yang disediakan secara mandiri oleh masyarakat maupun bantuan pemerintah Kampung yang dibangun di setiap RT. Sistem sanitasi masyarakat seperti jamban, septic tank pada umumnya sudah tersedia, bagi yang belum memiliki fasilitas tersebut pemerintah kampung membangun fasilitas MCK umum di beberapa titik kampung agar Masyarakat tidak membuang air di Sungai atau tempat-tempat lainnya.


Sumur bor Umum (dok.ippm)


MCK Umum permanen (dok.ippm)

Fasilitas listrik di Kampung Kaugapa bersumber dari layanan PLN dan telah terdistribusi secara merata ke seluruh kawasan permukiman dengan waktu pelayanan selama 24 jam penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses listrik di kampung tersebut relatif baik dan tidak

menimbulkan kendala berarti bagi aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain itu, pada beberapa ruas jalan di RT IV telah dipasang lampu penerangan jalan bertenaga surya (*solar cell*) yang dibangun oleh pemerintah kampung melalui dukungan Dana Desa, sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan lingkungan pada malam hari.

Berbeda dengan kondisi penyediaan listrik, pengelolaan sampah di Kampung Kaugapa masih tergolong belum memadai. Berdasarkan hasil observasi lapangan, belum tersedia fasilitas bak sampah umum maupun Tempat Penampungan Sementara (TPS). Akibatnya, masyarakat cenderung mengelola sampah rumah tangga secara mandiri dengan cara membuang dan membakar sampah di halaman rumah masing-masing. Praktik ini berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan lingkungan dan kualitas udara apabila tidak dikelola secara berkelanjutan.

Dari sisi infrastruktur lingkungan, sistem drainase permukiman pada umumnya belum dibangun secara permanen. Saluran air masih berupa galian parit sederhana yang berfungsi mengalirkan air menuju parit utama. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas drainase menjadi terbatas, sehingga Kampung Kaugapa relatif rentan mengalami genangan air, terutama pada saat curah hujan tinggi. Situasi ini menunjukkan perlunya penataan dan peningkatan kualitas drainase sebagai bagian dari upaya perbaikan infrastruktur dasar kampung.

6. Kondisi Lingkungan Permukiman

Kebersihan lingkungan di sekitar rumah di Kampung Kaugapa pada umumnya menjadi tanggung jawab masing-masing keluarga. Secara berkala, pemerintah kampung juga menginisiasi kegiatan kerja bakti massal, termasuk pembabatan rumput di lingkungan permukiman, sebagai upaya menjaga kebersihan dan kerapian kampung.

Akses jalan menuju rumah warga dari jalan raya sebagian besar masih berupa jalan tanah dan belum dilapisi aspal maupun semen. Selain itu, hanya sebagian kecil rumah penduduk yang telah dilengkapi pagar permanen dari beton atau seng, sementara sebagian besar rumah tidak memiliki pagar. Batas antar pekarangan umumnya ditandai secara sederhana, seperti dengan penanaman pohon atau bunga, serta pembuatan parit kecil sebagai saluran pembuangan air.

Kondisi jalan tanah tersebut menimbulkan sejumlah dampak negatif. Pada musim hujan, jalan menjadi becek, licin, dan berlubang, sehingga menyulitkan mobilitas warga, meningkatkan risiko terpeleset atau kecelakaan, serta menghambat

akses kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Sementara itu, pada musim kemarau, jalan tanah menimbulkan debu yang berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan dan kenyamanan lingkungan. Secara umum, kualitas jalan yang kurang memadai juga berdampak pada terhambatnya aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, serta berpotensi mempercepat kerusakan kendaraan dan menurunkan kualitas lingkungan permukiman.

7. Masalah Utama dan Kebutuhan Perumahan

Berdasarkan data Kampung Kaugapa, terdapat 103 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Sebagian besar rumah tersebut terbuat dari kayu yang telah mengalami pelapukan akibat rayap, serta memiliki kondisi atap yang bocor sehingga air hujan mudah masuk ke dalam rumah. Sementara itu, rumah permanen yang terbuat dari semen juga menunjukkan tingkat kerusakan yang cukup signifikan, seperti lantai dan dinding yang terkelupas, retak dan pecah-pecah, sehingga menurunkan tingkat kenyamanan dan keselamatan penghuni.

Permasalahan lain yang menonjol adalah kelebihan jumlah penghuni per rumah *(overcrowding)*. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa satu rumah rata-rata dihuni oleh 3-7 kepala keluarga (KK) dalam satu unit rumah. Kondisi ini mencerminkan adanya keterbatasan ketersediaan rumah layak huni di Kampung Kaugapa. Pemerintah kampung telah melakukan upaya dengan mengajukan permohonan bantuan perumahan kepada Dinas Sosial, namun hingga akhir tahun 2025 bantuan tersebut belum terealisasi.


Tanggul sungai Wania (dok.ippm)

Kepadatan penghuni dalam satu rumah menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari aspek kesehatan, sosial, maupun kenyamanan hidup. Ruang gerak yang terbatas dan minimnya privasi berpotensi memicu konflik antar penghuni. Dari sisi kesehatan, kepadatan hunian dapat memperburuk sirkulasi udara, meningkatkan kelembapan, serta mempercepat penularan penyakit, terutama apabila kondisi sanitasi dan ventilasi tidak memadai. Selain itu, tingginya beban penggunaan fasilitas rumah seperti air dan listrik mempercepat penurunan kualitas bangunan, serta meningkatkan risiko kerusakan struktural dan kebakaran.

Di sisi lain dalam konteks sosial tertentu, kondisi hunian bersama juga memiliki dampak positif, seperti penghematan biaya hidup, penguatan solidaritas keluarga besar, serta adanya praktik saling membantu dalam aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, untuk meminimalkan dampak negatif sekaligus mempertahankan nilai sosial yang positif, diperlukan penanganan yang komprehensif melalui peningkatan ketersediaan rumah layak huni, penyesuaian jumlah penghuni dengan luas bangunan, serta perbaikan kualitas sarana dan prasarana hunian di Kampung Kaugapa.

C. Kependudukan

1. Suku-suku di Kampung

a. Suku/marga asli

Penduduk asli Kampung Kaugapa berasal dari sejumlah suku atau marga utama, antara lain Mametapo, Yemaro, Yapurao, Tayaro, Epoko, Yawa, Wapuku, Baratowau, Kapirapu, Maira, Inawouw, Paipa, Upaewa, Mupiyu, Makarkame, Wapa, Kaugapaka, Tawapowau dan Tawou. Keberadaan marga-marga tersebut mencerminkan keragaman struktur kekerabatan yang membentuk identitas sosial masyarakat Kampung Kaugapa.

Masyarakat Kampung Kaugapa menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik berdasarkan pihak ayah. Sebaran marga dalam wilayah kampung bersifat menyebar dan tidak terpusat pada satu lokasi tertentu untuk masing-masing marga, sehingga pola permukiman antar marga cenderung bercampur.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, sistem patrilineal tercermin dalam beberapa aspek utama. Pertama, keanggotaan marga atau klan ditentukan berdasarkan garis keturunan ayah, sehingga anak secara adat menjadi bagian dari keluarga ayah. Kedua, hak atas tanah, rumah, dan harta adat umumnya diwariskan melalui garis laki-laki. Ketiga, laki-laki memegang peran sentral dalam pengambilan keputusan adat serta kepemimpinan kampung. Keempat, setelah menikah, perempuan pada umumnya mengikuti tempat tinggal atau lingkungan keluarga suami.

Secara keseluruhan, sistem kekerabatan patrilineal berfungsi menjaga keberlanjutan marga, stabilitas sosial dan keteraturan adat, sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan dan struktur sosial masyarakat Kampung Kaugapa.

b. Suku pendatang

Masyarakat pendatang yang bermukim di Kampung Kaugapa berasal dari berbagai daerah dan latar belakang suku, antara lain Bugis, Kei dan Jawa. Kehadiran kelompok pendatang ini telah menjadi bagian integral dari kehidupan sosial kampung dan berkontribusi pada keberagaman budaya yang berkembang di masyarakat. Secara umum, masyarakat pendatang diterima dengan baik dan hidup berdampingan secara harmonis dengan masyarakat asli Kampung Kaugapa.

Sebagian besar masyarakat pendatang telah menetap dalam jangka waktu yang relatif lama, terutama sejak pelaksanaan program transmigrasi di wilayah Mimika. Dalam prosesnya, mereka berbaur dan beradaptasi dengan komunitas lokal serta mengambil peran dalam berbagai bidang kehidupan, seperti sebagai aparat kampung, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, pemuka agama dan pelaku usaha atau pedagang. Keterlibatan aktif masyarakat pendatang tersebut memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan sosial, pendidikan dan ekonomi Kampung Kaugapa, serta memperkuat kohesi sosial antara penduduk asli dan pendatang.

c. Peran sosial masing-masing kelompok etnis

Masyarakat asli Kampung Kaugapa sebagai suku yang dominan memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan pemerintahan kampung. Mereka banyak mengisi jabatan-jabatan strategis sebagai aparat kampung, serta berperan sebagai petani tradisional yang mengelola lahan dan sumber daya alam secara turun-temurun. Selain itu masyarakat asli juga berperan sebagai pemuka agama dan tokoh adat yang menjaga nilai-nilai budaya, norma sosial, serta kearifan lokal yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, masyarakat pendatang turut berkontribusi dalam dinamika sosial dan ekonomi Kampung Kaugapa melalui berbagai peran dan profesi. Suku pendatang umumnya beraktivitas sebagai petani dan peternak, pedagang, aparatur sipil negara (ASN), serta anggota TNI dan Polri. Pembagian peran ini mencerminkan adanya kerja sama dan saling melengkapi antara masyarakat asli dan pendatang, yang pada akhirnya memperkuat kehidupan sosial, ekonomi dan keamanan di Kampung Kaugapa.

d. Relasi sosial

Relasi sosial di kalangan masyarakat Kampung Kaugapa hingga saat ini berlangsung secara harmonis dan penuh kerukunan. Masyarakat menjunjung tinggi

nilai toleransi antar umat beragama memberikan kebebasan bagi setiap pemeluk agama untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing. Sikap saling menghargai perbedaan ini menjadi dasar kuat dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial dan menciptakan suasana kampung yang aman serta damai.

Selain itu semangat gotong royong dan saling menghormati antar warga masih terpelihara dengan baik, baik antara masyarakat asli maupun pendatang. Kerja sama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti acara adat, kegiatan keagamaan, dan pembangunan kampung, menunjukkan kuatnya ikatan sosial di tengah keberagaman. Nilai-nilai kebersamaan tersebut menjadi modal sosial yang penting dalam memperkuat persatuan serta mendukung keberlanjutan pembangunan sosial di Kampung Kaugapa.

e. Norma adat dan sistem sosial

Seiring berjalannya waktu aturan adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Kaugapa mulai terkikis. Aturan/Larangan yang dahulu ada hilang berganti dengan pola hidup modern yang berkembang sampai ke Kampung, misalnya, tradisi penyelesaian masalah yang biasanya diselesaikan secara adat kini tidak lagi terlihat karena masyarakat memilih untuk melapor ke pihak berwajib (Polisi). Selain itu tradisi pernikahan yang dahulu kental dengan norma adat sekarang hilang juga berganti dengan tradisi modern.

Struktur dan peran lembaga adat yang dipimpin oleh seorang kepala suku dahulu memiliki peran yang sangat kuat sebelum terbentuknya struktur pemerintahan Kampung, sekarang hanya terbatas mengurus dan menyelesaikan persoalan adat jika ada yang melapor.

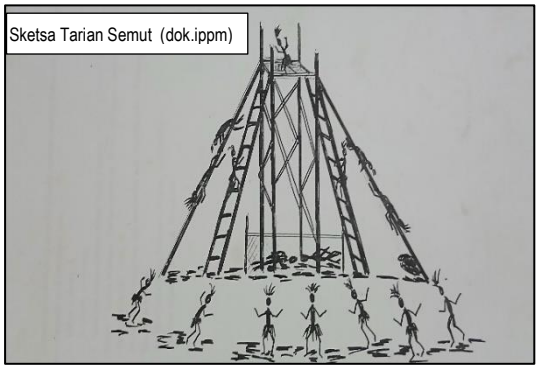
Selain itu, norma adat berperan dalam menjaga identitas dan kelestarian budaya, karena nilai-nilai leluhur diwariskan dari generasi ke generasi. Norma adat juga berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, di mana pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme musyawarah dan sanksi adat yang bersifat mendidik. Dalam konteks pembangunan, norma adat membantu menjaga kelestarian lingkungan, mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bijak, serta memperkuat rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial masyarakat.

f. Ritual, tradisi dan upacara

Ritual tradisional yang masih dijalankan sampai saat ini yaitu pembangunan rumah adat karapaopi untuk mempersiapkan anak yang masih berusia kurang lebih

5 tahun agar lebih cepat tumbuh dewasa (bertambah tinggi). Ritual tersebut biasanya dilaksanakan pada bulan maret dan melibatkan semua penduduk Kampung.

Simbol budaya lain yang menjadi ciri khas masyarakat Kampung Kaugapa yaitu tarian tradisional yang disebut tarian semut. Bapak Markus Yemaro sebagai penulis sinopsis tarian ini pernah diundang Bersama penari dari Kampung Kaugapa untuk mengikuti festival tari-tarian di Kota Jayapura pada tahun 2008.



Ritual adat berfungsi sebagai media pelestarian nilai, kepercayaan, dan warisan leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui ritual, masyarakat meneguhkan identitas budaya dan rasa memiliki terhadap tradisi bersama.

Selain itu, ritual adat berperan dalam memperkuat ikatan sosial, karena dilaksanakan secara kolektif melalui kebersamaan, gotong royong, dan musyawarah. Dari sisi spiritual, ritual adat menjadi sarana ungkapan syukur, permohonan keselamatan, dan keseimbangan hubungan antara manusia, alam dan Sang Pencipta. Ritual juga memiliki fungsi sosial sebagai pengendali perilaku, karena mengajarkan norma, etika dan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Dengan demikian, ritual adat berkontribusi penting dalam menjaga keharmonisan sosial, kelestarian budaya dan keseimbangan kehidupan masyarakat.

g. Pengetahuan lokal

Kearifan lokal masyarakat asli Kampung Kaugapa dalam mengelola sumber daya alam masih terpelihara hingga saat ini. Pemanfaatan hutan sagu, sebagai sumber pangan utama, dilakukan secara terbatas dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, tanpa praktik eksploitasi berlebihan yang dapat merusak lingkungan.

Pelestarian pengetahuan lokal menjadi aspek yang sangat penting karena pengetahuan tersebut merupakan warisan budaya yang telah teruji oleh pengalaman dan interaksi masyarakat dengan lingkungannya dalam jangka panjang. Pengetahuan lokal berfungsi sebagai fondasi identitas budaya, karena di dalamnya

terkandung nilai, norma, bahasa, serta cara pandang hidup yang membedakan komunitas Kampung Kaugapa dari komunitas lainnya.

Selain itu pengetahuan lokal berperan signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti praktik bercocok tanam, penangkapan ikan, dan pemanfaatan hutan yang selaras dengan daya dukung lingkungan. Dari aspek sosial, pengetahuan lokal memperkuat kohesi dan solidaritas masyarakat karena diwariskan melalui proses interaksi antar generasi. Dalam konteks pendidikan, pengetahuan lokal juga menjadi landasan penting bagi pengembangan pendidikan kontekstual yang membantu generasi muda memahami lingkungan sosial dan alamnya sendiri. Dengan memelihara pengetahuan lokal, masyarakat Kampung Kaugapa dapat beradaptasi terhadap perubahan dan pembangunan modern tanpa kehilangan jati diri serta kearifan yang telah diwariskan secara turun-temurun.

h. Nilai-nilai dasar masyarakat

Nilai-nilai dasar masyarakat Kampung Kaugapa, seperti solidaritas, gotong royong, dan kerja sama antar warga, hingga saat ini masih terpelihara dengan baik. Kehidupan sosial masyarakat ditandai oleh kuatnya nilai kekeluargaan serta penghormatan terhadap tokoh adat dan tokoh agama. Dalam praktiknya, berbagai urusan yang berkaitan dengan kehidupan kampung senantiasa dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan para tokoh yang dituakan. Hal-hal yang menyangkut adat istiadat, sejarah kampung dan budaya lokal tidak disampaikan secara sembarangan, melainkan hanya oleh tokoh-tokoh tertentu yang dianggap memiliki pengetahuan dan kewenangan adat yang diwariskan secara turun-temurun.

Bahasa lokal yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Kaugapa adalah Bahasa *Kaugapa*, yang hingga kini masih lestari dan terus diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat setempat. Penggunaan bahasa daerah ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana pewarisan nilai, norma dan pengetahuan lokal.

Pemeliharaan nilai-nilai dasar tersebut memiliki arti penting karena menjadi fondasi kehidupan sosial dan pedoman perilaku warga kampung. Nilai gotong royong, saling menghormati, kebersamaan, kejujuran dan kepedulian berperan dalam menciptakan hubungan sosial yang harmonis serta memperkuat persatuan masyarakat. Selain itu, nilai-nilai tersebut menjadi rujukan dalam penyelesaian

persoalan dan konflik secara musyawarah, menjaga ketertiban dan kedamaian sosial. Sebagai warisan budaya, nilai-nilai dasar ini juga membentuk karakter generasi muda dan memperkuat identitas masyarakat Kampung Kaugapa, sehingga masyarakat mampu menghadapi perubahan sosial dan modernisasi tanpa kehilangan jati diri, solidaritas dan keseimbangan hidup bersama.

2. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Kaugapa berdasarkan data agregat semester-1 tahun 2025 dari Dukcapil tercatat sebanyak 1.795 jiwa yang tergabung dalam 479 kepala keluarga (KK) dan tersebar pada lima (5) Rukun Tetangga (RT)**.** Data ini menunjukkan skala komunitas kampung yang relatif berkembang dengan sebaran penduduk yang terorganisasi secara administratif, sehingga mendukung pengelolaan pelayanan pemerintahan kampung dan kehidupan sosial masyarakat.

Berdasarkan komposisi jenis kelamin, penduduk Kampung Kaugapa terdiri atas 927 jiwa laki-laki (51,64%) dan 868 jiwa perempuan (48,36%)**.** Komposisi tersebut memperlihatkan keseimbangan jumlah penduduk antara laki-laki dan perempuan, yang menjadi potensi penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, serta partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas kampung.

Secara etnis, penduduk Kampung Kaugapa didominasi oleh suku asli Kapaowe yang telah mendiami wilayah kampung secara turun-temurun hingga saat ini. Keberadaan masyarakat adat Kapaowe menjadi fondasi utama kehidupan sosial dan budaya kampung, yang tercermin dalam praktik adat, penggunaan bahasa lokal, serta sistem nilai yang masih terpelihara dalam kehidupan sehari-hari.

Selain masyarakat asli, Kampung Kaugapa juga dihuni oleh masyarakat Papua dari kampung-kampung sekitar serta masyarakat pendatang yang berasal dari berbagai latar belakang etnis, antara lain suku Bugis, Kei dan sebagian kecil suku Jawa. Umumnya, masyarakat pendatang tersebut beraktivitas pada sektor ekonomi, seperti berdagang melalui usaha kios, bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN), serta mengelola usaha pertanian. Keberagaman etnis ini memperkaya dinamika sosial Kampung Kaugapa dan mendorong terbangunnya interaksi sosial yang harmonis dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Struktur umur penduduk

Struktur umur penduduk memberikan gambaran tentang potensi demografi yang dapat dimaksimalkan melalui perencanaan pembangunan yang responsif usia, terutama dalam penyediaan pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi. Distribusi penduduk Kampung Kaugapa menurut umur pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Distribusi Penduduk Kampung Kaugapa menurut Umur Tahun 2025

No.	Interval Umur (Tahun)	Jumlah	Presentase
1.	0 - 4	132	7,35
2.	5 - 9	188	10,47
3.	10 - 14	176	9,81
4.	15 - 19	188	10,47
5.	20 - 24	186	10,36
6.	25 - 29	188	10,47
7.	30 - 34	137	7,63
8.	35 - 39	128	7,13
9.	40 - 44	104	5,79
10.	45 - 49	102	5,68
11.	40 - 54	75	4,18
12.	55 - 59	57	3,18
13.	60 - 64	55	3,06
14.	65 - 69	42	2,34
15.	70 - 74	23	1,28
16.	75+	14	0,78
	Total	1.795	100

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Distribusi penduduk kampung Kaugapa berdasarkan rasio beban tanggungan *(Dependency Ratio)* yaitu sebesar:

$$\frac{496 + 79}{1.220} \times 100 = 47{,}13 \text{ dibulatkan menjadi } 47$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, rasio beban tanggungan (DR) di Kampung Kaugapa sebesar 47, yang berarti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 47 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan ≥65 tahun). Angka DR yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa Kampung Kaugapa sudah memasuki fase bonus demografi, yaitu kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia nonproduktif. Secara teoritis

kondisi ini merupakan peluang strategis bagi pembangunan ekonomi, namun pada saat yang sama dapat menjadi tantangan apabila penduduk usia produktif belum memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, keterampilan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial, sehingga pendapatan yang dihasilkan masih harus terserap untuk memenuhi kebutuhan kelompok nonproduktif.

Di sisi lain, berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Dinas Dukcapil Kabupaten Mimika Tahun 2025, tingkat kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Kampung Kaugapa tergolong cukup tinggi, yaitu Kartu Keluarga (KK) 99,16%, Akta Kelahiran 98,70%, e-KTP 79,97%, dan Kartu Identitas Anak (KIA) 47,76%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah tercatat secara resmi dalam sistem administrasi kependudukan negara, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial dan program perlindungan pemerintah lainnya.

Namun demikian, masih terdapat lebih dari 20% penduduk yang belum memiliki e-KTP, yang mengindikasikan adanya kendala mobilitas, tingkat kesadaran administrasi, maupun keterbatasan akses terhadap layanan perekaman kependudukan di tingkat kampung. Oleh karena itu, diperlukan strategi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif, kolaboratif dan sensitif terhadap konteks lokal, agar seluruh penduduk dapat terdata secara sah dan optimal sebagai bagian dari sistem kependudukan negara, sekaligus mendukung pemanfaatan peluang bonus demografi secara lebih efektif dan berkelanjutan.

c. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat stabilitas sosial dan politik, menciptakan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat pendidikan di suatu wilayah, semakin besar peluang wilayah tersebut untuk berkembang secara cepat dan berkelanjutan.

Data pendidikan penduduk Kampung Kaugapa menunjukkan bahwa akses dan capaian pendidikan masih sangat terbatas. Berdasarkan data tahun 2025, penduduk yang tidak/belum sekolah (37,21%), ditambah dengan penduduk belum tamat SD (20,33%). Artinya lebih dari 57% penduduk belum menyelesaikan pendidikan dasar. Jika digabungkan dengan penduduk yang hanya tamat SD

(15,99%), maka secara keseluruhan sekitar 73,5% penduduk Kampung Kaugapa berada pada tingkat pendidikan SD ke bawah. Kondisi ini menegaskan bahwa mayoritas masyarakat masih berada pada level pendidikan dasar atau bahkan belum tersentuh pendidikan formal sama sekali.

Sementara itu, penduduk yang menamatkan SLTP (8,75%) dan SLTA (15,65%) masih relatif terbatas, sedangkan penduduk yang mencapai pendidikan tinggi sangat kecil, yaitu Diploma I/II sebesar 0,22%, Akademi/D-III 0,33%, dan D-IV/S-1 hanya 1,50%. Komposisi ini menunjukkan bahwa hanya sekitar 2% penduduk Kampung Kaugapa yang memiliki pendidikan tinggi, sehingga kapasitas sumber daya manusia pada level keterampilan menengah–tinggi masih sangat rendah.

Distribusi penduduk Kampung menurut tingkat pendidikan tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.Distribusi Penduduk Kampung Kaugapa menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase
		L	P		
1.	Tidak/belum sekolah	349	319	668	37,21
2.	Belum Tamat SD	171	194	365	20,33
3.	Tamat SD	135	152	287	15,99
4.	SLTP	86	71	157	8,75
5.	SLTA	169	112	281	15,65
6.	Diploma I/II	1	3	4	0,22
7.	Akademi/D-III	4	2	6	0,33
8.	D-IV/S-1	12	15	27	1,50
	Jumlah	927	868	1.795	100

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Rendahnya capaian pendidikan penduduk Kampung Kaugapa sebagaimana ditunjukkan oleh dominasi penduduk tidak/belum sekolah dan berpendidikan dasar tidak dapat dilepaskan dari keterbatasan akses pendidikan formal di tingkat kampung. Saat ini, layanan pendidikan formal yang tersedia di Kampung Kaugapa hanya mencakup jenjang TK YPPK Terang Kristus, SD YPPK Santo Rafael, serta SMP YPPK Santo Emanuel Mapurujaya yang baru mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2025. Keterbatasan jenjang ini menyebabkan akses pendidikan

lanjutan belum sepenuhnya terjamin, terutama bagi anak-anak yang telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pertama.

Ketiadaan satuan pendidikan SMA/SMK di Kampung Kaugapa menjadi faktor struktural yang sangat menentukan rendahnya keberlanjutan pendidikan. Lulusan SMP dan SMA harus melanjutkan pendidikan ke pusat di Mapurujaya atau langsung ke Kota Mimika yang menuntut biaya transportasi, akomodasi dan kebutuhan hidup. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas dan pola hidup subsisten, situasi ini menjadi hambatan utama yang mendorong terjadinya putus sekolah pada jenjang menengah, sekaligus menjelaskan kecilnya proporsi penduduk yang mencapai pendidikan menengah atas dan pendidikan tinggi.

Kondisi akses pendidikan yang bersifat spasial dan berjenjang ini berimplikasi langsung pada struktur pendidikan penduduk Kampung Kaugapa, di mana sebagian besar masyarakat masih bertahan pada pendidikan dasar atau bahkan tidak mengenyam pendidikan formal sama sekali. Keterbatasan akses tersebut juga berdampak pada rendahnya motivasi melanjutkan sekolah, terutama ketika manfaat ekonomi pendidikan lanjutan belum dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

d. Mata pencaharian/pekerjaan

Mata pencaharian merupakan kegiatan utama yang dilakukan untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Konsep ini juga menggambarkan struktur ekonomi masyarakat, tingkat kemandirian, kemampuan memanfaatkan sumber daya lokal, serta sejauh mana suatu komunitas memiliki akses terhadap kesempatan kerja formal maupun informal.

Distribusi penduduk Kampung Kaugapa menurut matapencaharian pada tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Distribusi Penduduk Kampung Kaugapa menurut Matapencaharian Tahun 2025

No.	Mata pencaharian	Jumlah	Persentase
1.	Belum Bekerja	1.456	81,11
2.	Aparatur Pejabat Negara	18	1,00
3.	Tenaga Pengajar	16	0,89
4.	Wiraswasta	130	7,25
5.	Petani/Pekebun	163	9,08
6.	Nelayan	12	0,67
	Jumlah	1.795	100

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Data mata pencaharian penduduk menunjukkan bahwa sebagian sangat besar penduduk belum bekerja (81,11%), sementara penduduk yang bekerja tersebar pada sektor petani/pekebun (9,08%), wiraswasta (7,25%), serta sebagian kecil sebagai aparatur sipil negara (1,00%), tenaga pengajar (0,89%) dan nelayan (0,67%). Komposisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi formal dan produktif di kampung masih sangat terbatas, dengan sektor pertanian menjadi salah satu tumpuan utama mata pencaharian riil bagi penduduk yang telah bekerja.

Dominasi sektor pertanian, meskipun secara persentase relatif kecil dibandingkan jumlah penduduk yang belum bekerja, memiliki makna sosial-ekonomi yang penting bagi keberlangsungan hidup kampung. Sebagaimana pernyataan yang dikemukakan, keberadaan petani dan pekebun berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga, karena sebagian kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari hasil sendiri. Pola kerja pertanian yang berbasis kebersamaan juga memperkuat ikatan sosial dan praktik gotong royong, terutama dalam kegiatan membuka lahan, menanam dan panen. Selain itu, lingkungan kampung cenderung tetap alami dan hijau, serta pengetahuan lokal mengenai pertanian dan pengelolaan alam tetap terpelihara sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat.

Namun demikian struktur mata pencaharian ini juga menunjukkan tantangan serius. Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional menyebabkan pendapatan masyarakat tidak stabil, karena sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, serta keterbatasan akses pasar. Rendahnya proporsi penduduk yang bekerja di sektor nonpertanian, ditambah dengan tingginya jumlah penduduk yang belum bekerja, mencerminkan terbatasnya diversifikasi ekonomi dan peluang kerja produktif di kampung. Kondisi ini berpotensi menghambat inovasi, menekan tingkat kesejahteraan dan memperkuat kerentanan ekonomi rumah tangga, terutama ketika hasil pertanian menurun.

Keterbatasan teknologi, rendahnya tingkat pendidikan, dan minimnya pelatihan keterampilan turut memengaruhi rendahnya produktivitas sektor pertanian. Akibatnya, meskipun pertanian menjadi sumber penghidupan utama, kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang masih relatif rendah. Situasi ini sejalan dengan pernyataan bahwa tanpa dukungan kapasitas dan akses yang memadai, kampung berbasis pertanian sulit berkembang secara optimal.

Dengan demikian, data mata pencaharian penduduk menegaskan bahwa sektor pertanian merupakan fondasi ekonomi kampung, namun memerlukan intervensi strategis berupa peningkatan kapasitas petani, diversifikasi usaha ekonomi, penguatan kewirausahaan lokal, serta perluasan akses pasar. Dukungan pelatihan, teknologi tepat guna dan integrasi sektor pertanian dengan usaha nonpertanian menjadi kunci agar kampung yang didominasi oleh petani dapat berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata.

e. Status sosial ekonomi

Struktur mata pencaharian masyarakat Kampung Kaugapa menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan status sosial-ekonomi masyarakat yang sebagian besar berada pada kategori menengah ke bawah**.** Data memperlihatkan bahwa 81,11% penduduk belum bekerja**,** sementara penduduk yang bekerja didominasi oleh sektor pertanian/pekebunan (9,08%)**,** wiraswasta kecil (7,25%)**,** serta proporsi yang sangat terbatas pada sektor formal. Komposisi ini mencerminkan dominasi pekerjaan sektor informal dan subsisten dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah dan tidak stabil.

Ketergantungan pada sektor pertanian tradisional dan usaha kecil informal berdampak langsung pada rendahnya pendapatan rumah tangga dan terbatasnya peluang mobilitas sosial. Pekerjaan di sektor ini umumnya sangat dipengaruhi oleh faktor musim, cuaca, serta fluktuasi harga, sehingga pendapatan masyarakat bersifat tidak menentu. Kondisi tersebut sejalan dengan karakteristik masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang memiliki daya tahan ekonomi rendah, minim tabungan, dan rentan terhadap guncangan ekonomi maupun keadaan darurat.

Rendahnya tingkat pendidikan, sebagaimana tercermin dalam struktur pendidikan penduduk sebelumnya, turut mempersempit akses masyarakat terhadap pekerjaan formal dan peluang ekonomi yang lebih produktif. Akibatnya, sebagian besar rumah tangga tinggal di hunian sederhana dengan akses layanan dasar yang belum optimal**,** serta menjalankan pola konsumsi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan primer sehari-hari. Situasi ini memperkuat siklus kemiskinan struktural, di mana keterbatasan pendidikan membatasi jenis pekerjaan, dan keterbatasan pekerjaan menahan peningkatan kesejahteraan.

f. Agama dan lembaga keagamaan

Komposisi agama yang dianut penduduk kampung yaitu Kristen, Katolik dan Islam. Distribusi penduduk Kampung Kaugapa menurut agama pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4. Distribusi Penduduk Kampung Kaugapa menurut Agama Tahun 2025

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1.	Katolik	1.151	64,12
2.	Protestan	163	9,08
3.	Islam	481	26,80
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
	Jumlah	1.795	100

Sumber: Data DKB Dukcapil Semester-1, 2025

Komposisi penduduk Kampung Kaugapa berdasarkan agama menunjukkan tingkat keberagaman yang cukup signifikan. Pemeluk agama Katolik merupakan kelompok mayoritas dengan jumlah 1.151 jiwa (64,12%), diikuti oleh pemeluk agama Islam sebanyak 481 jiwa (26,80%), serta agama Protestan sebanyak 163 jiwa (9,08%). Sementara itu, tidak tercatat keberadaan pemeluk agama Hindu dan Buddha. Struktur ini mencerminkan konfigurasi sosial-keagamaan yang majemuk, dengan satu kelompok dominan namun tetap diimbangi oleh keberadaan kelompok minoritas yang cukup berarti secara demografis.

Keberagaman pemeluk agama dalam satu kampung memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan kehidupan sosial yang harmonis. Interaksi sehari-hari antar umat beragama mendorong tumbuhnya sikap toleransi, saling menghormati, dan saling memahami di tengah perbedaan keyakinan. Kondisi ini berpotensi menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang rukun dan damai, selama nilai-nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap perbedaan terus dipelihara melalui komunikasi yang terbuka dan praktik sosial yang inklusif.

Selain itu, keberagaman agama memperkaya wawasan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan masyarakat kampung. Warga belajar untuk menerima perbedaan tanpa harus kehilangan identitas keagamaannya masing-masing. Dalam konteks kehidupan kampung, keberagaman ini tampak dalam kerja sama lintas agama pada berbagai kegiatan sosial, seperti gotong royong, perayaan hari besar keagamaan, maupun penyelesaian persoalan bersama. Praktik-praktik tersebut memperkuat

persatuan, solidaritas sosial, serta rasa memiliki terhadap kampung sebagai ruang hidup bersama.

3. Migrasi dan Mobilitas Penduduk

a. Migrasi masuk (*in-migration*)

Penduduk dari luar Kampung Kaugapa yang datang ke wilayah kampung pada umumnya memiliki tujuan yang bersifat sementara maupun fungsional**.** Kedatangan tersebut antara lain untuk mengunjungi keluarga**,** menumpang tinggal sementara**,** mencari pekerjaan**,** serta melaksanakan aktivitas kerja pada sektor tertentu, seperti tenaga pendidik (guru) dan kesehatan (tenaga medis)**.** Selain itu, terdapat pula penduduk dari luar kampung yang datang untuk berdagang maupun yang kemudian menjalin ikatan perkawinan dengan masyarakat setempat dan menetap sebagai bagian dari komunitas kampung.

Meskipun terdapat arus masuk penduduk dari luar kampung, hingga saat ini kehadiran pendatang tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap struktur sosial dan ekonomi Kampung Kaugapa**.** Tatanan sosial masyarakat adat tetap terjaga, nilai-nilai budaya lokal masih berfungsi dengan baik, serta pola hubungan sosial berlangsung secara harmonis dan saling menghormati. Demikian pula dalam aspek ekonomi, aktivitas masyarakat lokal masih menjadi penopang utama kehidupan kampung, sementara kontribusi pendatang bersifat melengkapi dan tidak menggeser struktur ekonomi yang telah ada.

Secara keseluruhan, dinamika mobilitas penduduk di Kampung Kaugapa berlangsung secara terkendali dan adaptif, dengan tingkat penerimaan sosial yang baik dari masyarakat setempat. Kondisi ini mencerminkan kemampuan masyarakat Kampung Kaugapa dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap pendatang dan pelestarian identitas sosial, budaya, serta ekonomi kampung secara berkelanjutan.

b. Migrasi keluar (*out-migration*)

Migrasi keluar (out-migration) dari Kampung Kaugapa merupakan fenomena yang terjadi secara terbatas dan bersifat selektif. Sebagian penduduk kampung merantau ke kota atau daerah lain dengan tujuan yang beragam. Terdapat penduduk yang menetap di luar kampung dalam jangka panjang, namun ada pula yang kembali ke Kampung Kaugapa setelah menyelesaikan aktivitasnya di luar daerah. Secara umum, tujuan utama migrasi keluar meliputi melanjutkan pendidikan pada

jenjang sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi, bekerja dan berdagang, pelayanan keagamaan, serta perkawinan dengan penduduk dari luar kampung.

Migrasi keluar tersebut membawa sejumlah dampak bagi kehidupan kampung. Di satu sisi, terdapat manfaat berupa pengiriman uang *(remitan)* kepada keluarga di kampung yang turut membantu perekonomian rumah tangga. Namun di sisi lain, migrasi juga berpotensi menimbulkan berkurangnya tenaga kerja usia muda, penurunan jumlah penduduk asli, serta perubahan nilai dan pola budaya. Bagi penduduk yang kembali ke kampung, migrasi sering kali diikuti dengan perubahan pola pikir dan cara pandang, yang dapat memengaruhi dinamika sosial dan aspirasi pembangunan di tingkat kampung.

c. Mobilitas harian/berkala

Selain migrasi keluar, Kampung Kaugapa juga mengalami mobilitas harian dan berkala yang berlangsung secara rutin. Pergerakan penduduk keluar-masuk kampung terjadi setiap hari maupun secara musiman dengan menggunakan kendaraan pribadi**,** seperti mobil dan sepeda motor, serta kendaraan umum yang telah beroperasi secara teratur mulai pukul 06.00 hingga 19.00 WIT. Mobilitas ini mencerminkan keterhubungan Kampung Kaugapa dengan wilayah perkotaan dan pusat aktivitas ekonomi di sekitarnya.

Aktivitas ekonomi harian dan berkala masyarakat yang paling menonjol adalah membawa hasil kebun untuk dijual ke pasar di kota**,** mengingat belum tersedianya pasar permanen di Kampung Kaugapa. Komoditas utama yang dipasarkan meliputi sagu, pisang, dan buah salak**,** serta berbagai hasil kebun lainnya seperti umbi-umbian, cabai, dan sayuran**.** Kegiatan ini menjadi sumber pendapatan penting bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antara kampung dan wilayah perkotaan.


Tipe mobil trayek Timika-Kaugapa (dok.ippm)

d. Dinamika perubahan komposisi penduduk

Dalam konteks dinamika perubahan komposisi penduduk, tren peningkatan maupun penurunan jumlah penduduk akibat mobilitas masuk dan keluar kampung relatif tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Arus migrasi yang terjadi

bersifat seimbang, sehingga jumlah penduduk Kampung Kaugapa cenderung stabil dari waktu ke waktu. Kondisi kestabilan populasi ini tidak memberikan dampak berarti terhadap perencanaan dan penyediaan layanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang hingga saat ini masih dapat direncanakan dan dikelola sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat kampung.

Keseimbangan migrasi membantu menjaga stabilitas jumlah penduduk, sehingga tekanan terhadap lahan, perumahan, dan fasilitas umum tidak berlebihan. Kehadiran pendatang membawa keragaman keterampilan, pengetahuan dan budaya yang dapat mendorong inovasi serta memperkaya kehidupan sosial, sementara keluarnya sebagian penduduk membuka ruang kesempatan kerja dan sumber daya bagi yang tinggal. Interaksi ini juga dapat memperkuat dinamika ekonomi lokal tanpa menimbulkan lonjakan kebutuhan yang tajam.

D. Pendidikan

1. Konsep Masyarakat tentang Pendidikan

a. Pandangan umum masyarakat

Pendidikan dalam pandangan masyarakat Kampung Kaugapa, khususnya para orang tua, dipahami sebagai aspek yang sangat penting bagi masa depan anak-anak**.** Kesadaran ini tercermin dari upaya orang tua yang secara konsisten memberikan dorongan, nasehat, dan motivasi kepada anak-anak mereka agar rajin bersekolah dan menempuh pendidikan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat Kampung Kaugapa, pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menentukan kualitas hidup generasi penerus.

Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai tantangan di lapangan. Beberapa orang tua menuturkan bahwa sebagian anak menunjukkan tingkat kedisiplinan yang rendah dalam mengikuti kegiatan sekolah**,** termasuk enggan untuk berangkat ke sekolah. Kondisi ini antara lain dipengaruhi oleh situasi lingkungan kampung yang telah terdampak oleh peredaran dan konsumsi minuman keras (miras)**,** sehingga memberikan pengaruh negatif terhadap perilaku dan motivasi belajar anak-anak. Faktor lingkungan sosial tersebut menjadi salah satu hambatan yang dirasakan dalam upaya menumbuhkan budaya belajar yang kuat di kalangan generasi muda.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, harapan masyarakat terhadap anak-anak yang sedang menempuh pendidikan tetap sangat besar. Orang tua berharap agar anak-anak dapat terus bersekolah dan tidak putus di tengah jalan, sehingga kelak mampu membantu orang tua serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendidikan dipahami sebagai jalan menuju masa depan yang lebih baik**,** di mana anak-anak diharapkan dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan bermartabat**.** Pemahaman ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Kaugapa menempatkan pendidikan sebagai sarana utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi kampung secara berkelanjutan.

b. Peran keluarga dalam pendidikan anak

Keterlibatan orang tua dalam memastikan kehadiran anak di sekolah merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan pendidikan anak. Orang tua murid pada TKK Terang Kristus sangat antusias setiap hari mengantar dan menjemput anak mereka di sekolah. Kepala Sekolah TKK (Maria Ohoiwutun, S.Pd) menyebutkan pada umumnya kesadaran dan peran orang tua sangat baik untuk mendukung anak mereka yang bersekolah.

Dukungan orang tua juga sangat penting dalam mengontrol aktivitas anak belajar di rumah. Pada umumnya orang tua di Kampung Kaugapa setiap saat selalu mengingatkan anak-anak mereka untuk belajar di rumah.

Keluarga berperan dalam pembentukan karakter dan nilai moral, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan sikap saling menghormati. Nilai-nilai ini ditanamkan melalui teladan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keluarga mendukung perkembangan intelektual anak dengan membiasakan anak belajar, membaca, berdiskusi, serta memberikan motivasi dan pendampingan dalam kegiatan sekolah. Ketiga, keluarga berperan dalam perkembangan emosional dan sosial, yaitu menciptakan rasa aman, kasih sayang dan kepercayaan diri agar anak mampu berinteraksi dengan baik.

Selain itu keluarga juga berfungsi sebagai pengawas dan pengarah, membantu anak menggunakan waktu dan teknologi secara bijak. Dengan keterlibatan aktif keluarga, pendidikan anak menjadi lebih optimal dan seimbang antara aspek akademik, moral dan sosial.

c. Nilai-nilai lokal tentang pendidikan

Secara spesifik tidak ditemukan ada nilai-nilai dan kearifan adat yang menghambat pendidikan formal. Pandangan generasi muda terhadap sekolah di Kampung Kaugapa nampaknya belum menunjukan perubahan yang lebih baik karena hampir semua generasi muda tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi bahkan ada yang putus sekolah sejak SD, SMP maupun SMA.

Dampak bagi masyarakat yang tidak melanjutkan studi yaitu peluang memperoleh pekerjaan dengan pendapatan lebih tinggi dan posisi strategis menjadi lebih terbatas, karena banyak lapangan kerja mensyaratkan pendidikan tinggi. Akses terhadap pengetahuan, keterampilan profesional, dan pengembangan diri juga menjadi lebih sempit. Dalam jangka panjang, hal ini dapat memengaruhi mobilitas sosial dan daya saing generasi muda di dunia kerja.

Dampak bagi masyarakat dan kampung, rendahnya jumlah lulusan perguruan tinggi dapat menghambat kemajuan sumber daya manusia, inovasi, dan kualitas kepemimpinan lokal. Pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan tata kelola berpotensi berjalan lebih lambat karena keterbatasan tenaga terdidik. Selain itu, ketergantungan pada sektor pekerjaan informal atau tradisional bisa semakin tinggi.

d. Isu dan tantangan sosial

Tantangan sosial seperti pernikahan dini masih ditemukan beberapa kejadian di Kampung Kaugapa, beban kerja anak tidak terlalu berat karena orang tua biasa membawa anak ikut bekerja di kebun ketika sekolah libur. Jarak sekolah yang dekat dan ada di dalam Kampung tidak menjadi masalah yang mengganggu bagi anak untuk bersekolah karena dapat ditempuh dengan berjalan kaki saja.

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih terjadi di berbagai wilayah, terutama di lingkungan pedesaan dan kampung. Salah satu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi, di mana keterbatasan pendapatan keluarga mendorong orang tua menikahkan anak lebih awal untuk mengurangi beban hidup. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan anak dan orang tua menyebabkan kurangnya pemahaman tentang risiko kesehatan, psikologis dan sosial dari pernikahan dini.

Faktor budaya dan adat istiadat juga turut berperan, karena dalam sebagian masyarakat pernikahan dini dianggap sebagai hal yang wajar atau cara menjaga

kehormatan keluarga. Pengaruh lingkungan dan pergaulan, termasuk kehamilan di luar nikah, seringkali menjadi pemicu langsung terjadinya pernikahan dini. Di samping itu, kurangnya peran dan pengawasan keluarga serta keterbatasan akses informasi tentang kesehatan reproduksi membuat anak belum siap secara mental dan emosional. Oleh karena itu pencegahan pernikahan dini memerlukan peran bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui pendidikan, pendampingan, dan peningkatan kesejahteraan.

2. Kelembagaan Pendidikan

a. Jenis Lembaga dan status sekolah

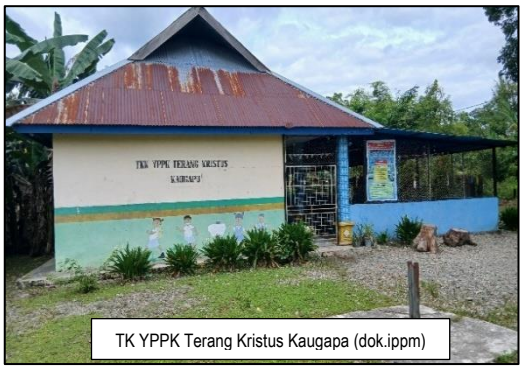
Lembaga pendidikan yang ada di Kampung Kaugapa terdiri dari satu Taman Kanak-kanak, satu Sekolah Dasar dan Satu Sekolah Menengah Pertama.

Tabel 3.5 Jenis Lembaga Pendidikan Di Kampung Kaugapa
Tahun 2025

No	Nama Lembaga	Tingkat	Status
1	TKK Terang Kristus	PAUD	Swasta (YPPK)
2	SD YPPK Santo Rafael	Sekolah Dasar	Swasta (YPPK)
3	SMP YPPK Santo Imannuel	Sekolah Menengah	Swasta (YPPK)

Sumber: Data Primer, 2025

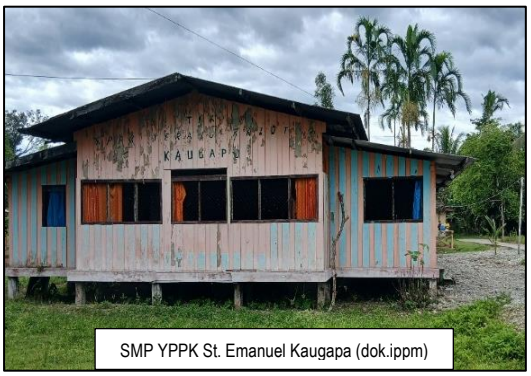
TKK Terang Kristus Kaugapa merupakan sekolah yang didirikan oleh Yayasan YPPK Tillemans pada tahun tahun 2002. Saat ini, TKK Terang Kristus memiliki tenaga guru sebanyak 2 orang guru, jumlah siswa sebanyak 56 orang. Gedung belajar ada tiga ruangan yang merupakan bantuan dari pemerintah Kampung, tambahan pembangunan WC/Toilet merupakan subsidi yayasan dan bantuan orang tua siswa. Siswa di TKK bukan hanya berasal dari Kampung Kaugapa tetapi juga berasal dari Kampung sekitar lainnya.


TK YPPK Terang Kristus Kaugapa (dok.ippm)



SD YPPK St. Rafaek Kaugapa (dok.ippm)

SD YPPK Santo Rafael didirikan pada tahun 1927 oleh Yayasan YPPK. Saat ini memiliki siswa sebanyak 300 lebih dengan jumlah guru sebanyak 13 orang. SMP YPPK Santo Emmanuel didirikan oleh Yayasan YPPK berdiri pada pertengahan tahun 2025. Jumlah siswa sebanyak 26 orang sedangkan jumlah guru sebanyak 8 orang guru yang diperbantukan dari SD YPPK Santo Rafael Kaugapa. SMP YPPK Santo Emanuel sementara masih menggunakan satu ruang Gedung SD sebagai tempat belajar dan bekas gedung gereja lama sebagai ruang guru, ruang TU dan asrama bagi siswa.



SMP YPPK St. Emanuel Kaugapa (dok.ippm)

b. Fasilitas sekolah

Fasilitas sekolah adalah seluruh sarana dan prasarana yang disediakan untuk mendukung proses pembelajaran dan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Distribusi fasilitas sekolah yang ada di Kampung Kaugapa dijabarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.6. Distribusi Fasilitas Sekolah di Kaugapa
Tahun 2025

No.	Sekolah	Jumlah Gedung	Kondisi
1.	TKK Terang Kristus	2 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 toilet	cukup layak
2.	SD YPPK Santo Rafael	6 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang TU, 1 ruang komputer	layak
3.	SMP YPPK Santo Emanuel	1 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang TU, Asrama	tidak layak

Sumber: Data Primer, 2025

Fasilitas sekolah yang tidak layak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap proses dan hasil pendidikan. Kondisi ruang kelas yang rusak, kurangnya meja kursi, pencahayaan dan ventilasi yang buruk, serta keterbatasan sarana belajar membuat kenyamanan dan konsentrasi siswa menurun. Hal ini menyebabkan proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan prestasi belajar sulit meningkat.

Selain itu, fasilitas yang tidak memadai dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan siswa dan guru, seperti risiko kecelakaan, kelelahan dan gangguan kesehatan. Dari sisi psikologis, lingkungan belajar yang tidak layak dapat

menurunkan motivasi, minat belajar, dan rasa percaya diri siswa. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antar wilayah dan menghambat pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu penyediaan fasilitas sekolah yang layak merupakan faktor penting dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu.

c. Aksesibilitas sekolah

Akses untuk ke sekolah, baik di Tingkat TKK, SD dan SMP cukup mudah karena sekolah berada di tengah kampung sehingga anak sekolah hanya menempuh perjalanan dengan berjalan kaki. Khusus untuk anak SMP karena sekolah berpola asrama jadi semua siswa tinggal di asrama selama hari sekolah. Asrama yang dikelola oleh keuskupan juga menerima siswa dari kampung lain untuk bersekolah di SMP YPPK Santo Emanuel Kaugapa.

Kemudahan akses meningkatkan kehadiran dan ketepatan waktu siswa, karena jarak tempuh lebih dekat, biaya transportasi lebih rendah, dan risiko keterlambatan berkurang. Hal ini berdampak langsung pada kelancaran proses belajar dan prestasi akademik.

Selain itu, akses mudah ke sekolah mendorong kesetaraan pendidikan, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, karena hambatan fisik dan ekonomi semakin kecil. Dari sisi keselamatan dan kesehatan, perjalanan yang singkat dan aman mengurangi risiko kecelakaan serta kelelahan siswa. Dalam jangka panjang, kemudahan akses ke sekolah berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

d. Manajemen dan tata Kelola

Manajemen dan tata kelola sekolah-sekolah yang ada di Kampung Kaugapa telah didukung oleh keberadaan berbagai unsur masyarakat, termasuk komite sekolah yang secara struktural sudah terbentuk di semua sekolah TK, SD dan SMP**.** Namun demikian, peran dan fungsi komite sekolah tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal sebagaimana mandatnya sebagai mitra strategis sekolah. Keterlibatan komite dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan masih bersifat terbatas, serta lebih banyak berlangsung secara informal dan insidental. Fungsi pengawasan, pemberian masukan strategis dan kontrol terhadap kinerja sekolah belum dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan.

Di sisi lain peran tokoh adat dan tokoh agama di Kampung Kaugapa relatif lebih menonjol dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, khususnya pada aspek pembinaan karakter peserta didik. Tokoh-tokoh ini berkontribusi aktif dalam membina mental, moral, dan rohani murid melalui berbagai kegiatan keagamaan yang terpusat di gereja. Penanaman nilai-nilai adat, kedisiplinan, kebersamaan, serta ajaran moral dan spiritual melalui aktivitas kerohanian memberikan penguatan karakter siswa di luar proses pembelajaran formal di ruang kelas.

Komunikasi antara pihak sekolah, orang tua murid, dan masyarakat Kampung Kaugapa secara umum telah terjalin dengan cukup baik. Hal ini tercermin dari keterlibatan orang tua dalam kegiatan sekolah dan pertemuan-pertemuan tertentu, serta adanya dukungan sosial masyarakat terhadap aktivitas pendidikan. Namun, komunikasi dan partisipasi tersebut belum sepenuhnya terlembaga dalam mekanisme kerja komite sekolah, sehingga potensi kolaborasi yang lebih terarah dan berdampak terhadap peningkatan mutu pendidikan masih perlu diperkuat melalui revitalisasi peran dan fungsi komite sekolah secara berkelanjutan.

3. Keadaan Guru dan Murid

a. Jumlah guru

Jumlah tenaga pendidik yang mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kampung Kaugapa tercatat sebanyak 16 orang guru. Para guru tersebut tersebar pada setiap jenjang pendidikan yang tersedia di kampung, yaitu 2 orang guru yang bertugas di TK, 13 orang guru SD, dan 1 orang guru di jenjang SMP. Sebaran jumlah guru ini mencerminkan konsentrasi layanan pendidikan yang masih bertumpu pada jenjang pendidikan dasar, sejalan dengan kondisi kebutuhan pendidikan masyarakat Kampung Kaugapa.

Seluruh guru yang bertugas di Kampung Kaugapa berstatus sebagai guru yayasan dan telah memiliki sertifikasi pendidik. Kepemilikan sertifikasi ini menunjukkan bahwa para guru telah memenuhi standar kompetensi profesional, pedagogik, sosial dan kepribadian sebagaimana dipersyaratkan dalam sistem pendidikan nasional. Dengan demikian secara kualitas, tenaga pendidik yang ada dinilai cukup memadai untuk mendukung proses pembelajaran, meskipun secara kuantitas masih menghadapi tantangan, terutama pada jenjang pendidikan lanjutan seperti SMP yang hanya didukung oleh satu orang guru.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, para guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas, tetapi juga sebagai pembimbing dan pendamping peserta didik dalam pengembangan karakter dan sikap sosial. Keterbatasan jumlah guru, khususnya pada jenjang tertentu, menuntut adanya peran ganda dari para guru dalam mengampu lebih dari satu mata pelajaran serta terlibat aktif dalam kegiatan sekolah lainnya. Kondisi ini menuntut dedikasi dan komitmen yang tinggi dari para guru yayasan agar proses pembelajaran tetap berjalan secara optimal.

Keberadaan guru-guru yayasan yang telah tersertifikasi ini menjadi modal penting bagi peningkatan mutu pendidikan di Kampung Kaugapa. Namun demikian, keberlanjutan dan pemerataan layanan pendidikan masih memerlukan dukungan tambahan, baik melalui penambahan jumlah guru sesuai kebutuhan jenjang pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru yayasan, maupun penguatan dukungan dari pemerintah dan yayasan pengelola sekolah. Dengan dukungan tersebut, diharapkan kualitas pembelajaran dan layanan pendidikan di Kampung Kaugapa dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

b. Kualifikasi dan kompetensi

Tingkat pendidikan guru yang mengajar di sekolah-sekolah di Kampung Kaugapa pada umumnya telah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan, yaitu berpendidikan sarjana (S1). Kualifikasi akademik ini menunjukkan bahwa para guru telah memiliki bekal pengetahuan dan kompetensi dasar yang memadai untuk melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, guru diharapkan mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran secara sistematis serta menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.

Selain memiliki kualifikasi akademik sarjana, para guru di Kampung Kaugapa juga telah memiliki sertifikat pendidik. Kepemilikan sertifikat ini menjadi indikator profesionalisme guru, karena menunjukkan bahwa mereka telah melalui proses penilaian kompetensi sesuai standar nasional pendidikan. Dengan kombinasi kualifikasi pendidikan dan sertifikasi pendidik, guru-guru di Kampung Kaugapa memiliki modal yang kuat untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran, meskipun dalam praktiknya masih diperlukan dukungan berkelanjutan berupa pelatihan, pendampingan, dan peningkatan kesejahteraan agar kinerja guru dapat terus optimal.

c. Kehadiran guru

Kehadiran guru dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di Kampung Kaugapa tergolong sangat baik. Hampir seluruh guru hadir secara rutin dan tepat waktu saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tingginya tingkat kehadiran guru ini mencerminkan komitmen dan tanggung jawab tenaga pendidik dalam menjalankan tugasnya, sekaligus memberikan rasa aman dan kepastian bagi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Meskipun sebagian besar guru berdomisili di luar Kampung Kaugapa dan menetap di kota, kondisi tersebut tidak menjadi hambatan yang berarti dalam pelaksanaan tugas mengajar. Akses transportasi dan kondisi jalan menuju kampung relatif mudah dan dapat dilalui dengan baik, sehingga mobilitas guru dari tempat tinggal menuju sekolah dapat dilakukan secara lancar. Kemudahan akses ini sangat mendukung konsistensi kehadiran guru di sekolah serta memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara optimal tanpa gangguan yang signifikan.

4. Partisipasi Siswa dalam Proses Belajar-Mengajar

a. Kehadiran dan keaktifan siswa

Tingkat kehadiran rata-rata siswa di TKK Terang Kristus dan SMP YPPK Santo Emanuel sangat baik. Siswa antusias dalam belajar dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dibuat oleh sekolah. Di TKK Terang Kristus ada kegiatan ekstrakurikuler praktik membuat *tauri* yaitu pakaian adat yang terbuat dari daun sagu. Di SMP YPPK Santo Emanuel siswa juga antusias dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pembuatan kebun sekolah yang hasilnya kemudian mereka manfaatkan untuk makan sehari-hari di asrama.



Bahan baku pembuatan *tauri* (dok.ippm)

Keterlibatan dalam diskusi, tugas, kegiatan sekolah lainnya juga sangat baik pada TKK Terang Kristus dan SMP YPPK Santo Emanuel. Untuk SD YPPK Santo Rafael saat ini belum ada data terkait keterlibatan siswa karena belum bertemu pimpinan sekolah untuk memperoleh informasi tersebut.

b. Dukungan keluarga

Dukungan orang tua dan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam mengontrol serta mendorong aktivitas belajar anak di luar jam sekolah, khususnya di lingkungan rumah. Di Kampung Kaugapa, pada umumnya orang tua menunjukkan kepedulian yang cukup tinggi terhadap pendidikan anak-anak mereka. Hal ini terlihat dari kebiasaan orang tua yang secara rutin mengingatkan anak untuk meluangkan waktu belajar di rumah, mengerjakan tugas sekolah, serta menjaga kedisiplinan belajar sehari-hari. Peran pengawasan ini membantu membentuk kebiasaan belajar yang positif dan menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sejak dini.

Selain dukungan dalam bentuk perhatian dan pengawasan, orang tua dan keluarga juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan belajar anak. Sekolah telah membantu menyediakan alat belajar utama seperti buku pelajaran dan seragam sekolah, sehingga beban orang tua menjadi lebih ringan. Selanjutnya orang tua melengkapi kebutuhan pendukung lainnya, seperti tas sekolah, sepatu, alat tulis, serta perlengkapan belajar lain yang dibutuhkan anak. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua ini menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, baik di sekolah maupun di rumah, sehingga anak-anak di Kampung Kaugapa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan lebih nyaman dan optimal.

c. Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi

Faktor utama yang mempengaruhi rendahnya partisipasi anak dalam mengikuti kegiatan sekolah di Kampung Kaugapa lebih banyak disebabkan oleh faktor internal anak, khususnya sikap kurangnya motivasi atau kemalasan untuk bersekolah. Hasil wawancara dengan orangtua dan guru, sebagian anak menunjukkan minat belajar masih rendah, sehingga sering enggan ke sekolah atau tidak mengikuti kegiatan pembelajaran secara konsisten. Kondisi ini bukan disebabkan tekanan ekonomi keluarga maupun tuntutan pekerjaan rumah tangga yang berlebihan, melainkan lebih pada kebiasaan dan pola perilaku anak yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan mereka.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa anak-anak di Kampung Kaugapa pada umumnya tidak dibebani pekerjaan berat untuk membantu orang tua, seperti bekerja secara intensif di kebun atau melakukan aktivitas ekonomi lainnya yang dapat mengganggu waktu sekolah. Selain itu, faktor eksternal seperti akses

transportasi dan kondisi cuaca relatif tidak menjadi kendala, mengingat letak sekolah berada dalam wilayah kampung dan mudah dijangkau dengan berjalan kaki. Rendahnya partisipasi sekolah lebih dipengaruhi oleh aspek motivasi dan kedisiplinan anak, sehingga diperlukan upaya bersama antara sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pembinaan karakter, serta motivasi belajar anak agar kehadiran dan partisipasinya di sekolah dapat meningkat secara berkelanjutan.

d. Kegiatan ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di TKK Terang Kristus berlangsung cukup beragam dan bernuansa kearifan lokal. Berbagai aktivitas praktik diperkenalkan kepada peserta didik, antara lain praktik pembuatan *tauri*, praktik pengambilan serta pemanfaatan tambelo dan ulat sagu, hingga kegiatan pengolahan hasil alam berupa pembuatan manisan ulat sagu. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan motorik anak sejak usia dini, tetapi juga untuk menanamkan pengetahuan tentang potensi sumber daya alam lokal serta nilai-nilai budaya yang hidup di lingkungan masyarakat sekitar.

Sementara itu, kegiatan ekstrakurikuler di SMP YPPK Santo Emmanuel difokuskan pada praktik pembuatan dan pengelolaan kebun sekolah. Melalui kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk mengenal proses bercocok tanam, merawat tanaman, serta memahami nilai kerja sama, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan. Kebun sekolah juga menjadi media pembelajaran kontekstual yang mengaitkan teori dengan praktik, sekaligus membekali siswa dengan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari dan penguatan karakter berbasis lingkungan.

5. Pendidikan Non Formal

a. Jenis pendidikan non formal dan penyelenggara

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, hingga saat ini Kampung Kaugapa belum memiliki kegiatan atau layanan pendidikan nonformal yang berlangsung secara aktif. Tidak terdapat program seperti kursus keterampilan, pendidikan keaksaraan, kelompok belajar masyarakat, maupun pelatihan peningkatan kapasitas yang ditujukan bagi anak, remaja, maupun orang dewasa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap jalur pendidikan di luar pendidikan formal masih sangat terbatas.

Ketiadaan pendidikan nonformal tersebut berimplikasi pada minimnya ruang pembelajaran alternatif bagi masyarakat Kampung Kaugapa, khususnya bagi warga yang tidak lagi bersekolah atau membutuhkan keterampilan praktis untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Untuk itu ke depan diperlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah, lembaga keagamaan, maupun pihak terkait lainnya untuk mengembangkan program pendidikan nonformal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat memperluas kesempatan belajar dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kampung Kaugapa.

b. Peserta pendidikan non formal

Peserta pendidikan nonformal pada umumnya berasal dari kelompok masyarakat yang tidak terjangkau pendidikan formal, seperti pemuda putus sekolah, pencari kerja, serta ibu rumah tangga yang membutuhkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Namun, di kampung ini belum tersedia layanan pendidikan nonformal, sehingga masyarakat yang berminat harus mengaksesnya ke Kota Timika. Keterbatasan jarak, biaya dan waktu menjadi kendala utama, sehingga akses terhadap pendidikan nonformal dan pembelajaran sepanjang hayat belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat kampung.

c. Tantangan pengembangan

Peserta pendidikan nonformal umumnya berasal dari pemuda putus sekolah, pencari kerja, ibu rumah tangga dan masyarakat umum yang membutuhkan peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Namun di kampung Kaukapu belum tersedia layanan pendidikan nonformal, sehingga masyarakat yang membutuhkan harus mengaksesnya ke Kota Timika dengan konsekuensi tambahan biaya, jarak, dan waktu. Kondisi ini menjadi kendala serius dalam upaya peningkatan kapasitas, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat kampung.

E. Kesehatan, Gizi dan Keluarga Berencana

1. Konsep Masyarakat tentang Sehat, Sakit dan Penyakit

a. Pemaknaan “sehat” menurut masyarakat

Dalam pandangan masyarakat Kampung Kaugapa, kondisi sehat dimaknai secara sederhana sebagai keadaan bebas dari penyakit atau keluhan fisik yang

menghambat aktivitas sehari-hari. Pemahaman ini berkembang seiring dengan pola hidup masyarakat yang sangat bergantung pada kekuatan fisik dalam bekerja dan menjalankan peran sosial. Kesehatan dipandang penting karena memungkinkan masyarakat tetap produktif, seperti pergi ke kebun, mencari nafkah, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, sehingga kesehatan tidak hanya dimaknai sebagai kondisi fisik semata, tetapi juga sebagai prasyarat utama memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga.

b. Pemaknaan "sakit"

Penyakit fisik yang paling umum dialami masyarakat Kampung Kaugapa adalah malaria serta batuk dan pilek, yang menurut keterangan warga sering terjadi secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Malaria masih menjadi masalah kesehatan utama, terutama pada musim hujan, akibat kondisi lingkungan permukiman yang kerap mengalami genangan air selama beberapa hari sehingga menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Sementara itu, batuk dan pilek dialami oleh berbagai kelompok usia dan banyak dipicu oleh letak permukiman yang berada di sepanjang ruas jalan raya, yang menyebabkan masyarakat mudah terpapar debu dari aktivitas lalu lintas. Kombinasi faktor lingkungan dan kondisi permukiman tersebut meningkatkan kerentanan masyarakat Kampung Kaugapa terhadap kedua jenis penyakit tersebut.

c. Penyebab penyakit menurut masyarakat

Di Kampung Kaugapa, penyebab utama munculnya berbagai penyakit berkaitan dengan kondisi lingkungan yang kurang bersih akibat perilaku buang sampah sembarangan serta tingginya populasi nyamuk. Lingkungan yang kotor menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan mikroorganisme penyebab penyakit, sehingga meningkatkan risiko penyakit menular seperti malaria, demam berdarah dengue (DBD), chikungunya dan filariasis. Selain berdampak pada kesehatan, banyaknya nyamuk juga mengganggu kenyamanan dan aktivitas sehari-hari masyarakat, menurunkan kualitas tidur dan produktivitas, serta dalam jangka panjang dapat memperburuk kualitas lingkungan dan meningkatkan beban biaya kesehatan keluarga maupun pemerintah.

d. Respons masyarakat ketika sakit

Penggunaan obat tradisional masih menjadi bagian dari praktik pengobatan yang dipercaya oleh sebagian masyarakat Kampung Kaugapa dalam menjaga dan

memulihkan kesehatan. Berbagai jenis tanaman dan bahan alami dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan, terutama untuk keluhan-keluhan ringan yang sering dialami dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu contoh yang umum digunakan adalah daun gatal, yang dipercaya dapat meredakan rasa lelah dan pegal-pegal pada tubuh setelah bekerja di kebun atau melakukan aktivitas fisik berat. Selain itu, tali kuning juga dikenal dan digunakan secara turun-temurun sebagai ramuan tradisional untuk membantu mengobati penyakit malaria. Kepercayaan terhadap obat tradisional ini tidak terlepas dari pengetahuan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dipraktikkan hingga saat ini.

Meskipun pengobatan tradisional masih digunakan, sebagian besar masyarakat Kampung Kaugapa telah memanfaatkan layanan kesehatan formal yang tersedia. Untuk penanganan penyakit yang membutuhkan pemeriksaan dan pengobatan medis, masyarakat umumnya memilih berobat ke Puskesmas Mapurujaya. Selain itu, layanan posyandu di Kampung Kaugapa juga dimanfaatkan secara aktif, khususnya oleh ibu hamil dan para lansia, untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan rutin, pemantauan kondisi kesehatan, serta penyuluhan gizi dan kesehatan. Kombinasi antara pemanfaatan pengobatan tradisional dan layanan kesehatan modern ini menunjukkan pola perilaku kesehatan masyarakat yang adaptif, dengan tetap menjaga kearifan lokal sekaligus menerima pelayanan medis sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan.

e. Peran tokoh adat/agama dalam Kesehatan

Peran tokoh agama dalam kehidupan masyarakat Kampung Kaugapa sangat penting, khususnya ketika anggota keluarga mengalami sakit. Dalam kondisi tersebut, keluarga biasanya memanggil tokoh agama untuk datang ke rumah dan mendoakan orang yang sedang sakit. Doa bersama ini diyakini memberikan kekuatan rohani, ketenangan batin, serta harapan akan kesembuhan, baik bagi penderita maupun bagi keluarga yang mendampingi.

Kehadiran tokoh agama tidak hanya dipandang sebagai pelayanan keagamaan, tetapi juga sebagai bentuk dukungan moral dan spiritual. Melalui doa dan nasihat rohani, keluarga merasa lebih tenang, tabah, dan termotivasi untuk tetap berikhtiar dalam proses penyembuhan. Praktik ini menunjukkan bahwa dalam pandangan masyarakat Kampung Kaugapa, kesehatan tidak hanya berkaitan

dengan aspek fisik, tetapi juga memiliki dimensi spiritual yang melengkapi upaya pengobatan, sekaligus memperkuat hubungan kekeluargaan dan solidaritas sosial di lingkungan sekitar.

2. Kesehatan

a. Jenis dan ketersediaan fasilitas kesehatan

Di Kampung Kaugapa sampai akhir tahun 2025 belum tersedia fasilitas kesehatan setara puskesmas maupun pustu. Masyarakat yang membutuhkan layanan pengobatan biasanya dibawa ke Puskesmas Mapurujaya yang berjarak sekitar 1,2 km dari pusa kampung, atau langsung dirujuk ke rumah sakit yang berada di Kota Timika. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan akses layanan kesehatan formal di tingkat kampung, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan cepat.

Satu-satunya fasilitas kesehatan yang tersedia di Kampung Kaugapa adalah posyandu yang dibangun tahun 2024. Posyandu tersebut difungsikan untuk melayani ibu hamil dan lansia, dengan kegiatan pelayanan yang dilaksanakan secara rutin sebulan sekali oleh petugas medis dari Puskesmas Mapurujaya. Kehadiran posyandu menjadi layanan kesehatan dasar yang paling dekat dan mudah dijangkau oleh masyarakat kampung.



Poasyandu Kampung Kaugapa (dok.ippm)

Posyandu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kampung Kaugapa, terutama dalam pemantauan kesehatan ibu hamil, balita, dan lansia, termasuk pertumbuhan anak, status gizi, serta kondisi kesehatan dasar. Selain itu, posyandu berperan dalam upaya pencegahan penyakit melalui imunisasi, pemberian vitamin, dan penyuluhan kesehatan serta gizi. Keberadaan posyandu juga mendorong penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kesadaran pencegahan penyakit sejak dini, serta memberdayakan masyarakat melalui keterlibatan kader kesehatan, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kampung secara berkelanjutan.

b. Tenaga kesehatan yang tersedia

Tenaga kesehatan yang tersedia secara langsung di Kampung Kaugapa saat ini terbatas pada keberadaan kader posyandu yang berjumlah dua orang. Kader

posyandu tersebut direkrut dari masyarakat setempat dan berperan membantu operasional pelayanan posyandu, terutama dalam kegiatan kesehatan dasar seperti penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan, pendampingan ibu hamil, serta membantu pelaksanaan imunisasi dan penyuluhan kesehatan. Keberadaan kader posyandu ini sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di tingkat kampung, sekaligus menjadi penghubung antara masyarakat dan fasilitas kesehatan formal.

Sementara itu, bidan dan tenaga medis lainnya tidak menetap di Kampung Kaugapa, melainkan bekerja di Puskesmas dan tinggal di luar kampung. Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap, masyarakat harus mengakses Puskesmas tersebut, baik untuk pemeriksaan lanjutan, persalinan, maupun penanganan penyakit tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Kampung Kaugapa masih sangat bergantung pada fasilitas kesehatan di luar kampung, sehingga penguatan peran kader posyandu serta peningkatan akses dan frekuensi layanan kesehatan menjadi hal penting dalam mendukung derajat kesehatan masyarakat.

c. Jenis penyakit yang umum terjadi

Jenis penyakit yang paling umum diderita oleh masyarakat Kampung Kaugapa adalah malaria serta batuk pilek. Kedua penyakit ini sering muncul dan dialami oleh berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Malaria cenderung meningkat pada musim hujan, sementara batuk dan pilek terjadi hampir sepanjang tahun dan menjadi keluhan kesehatan yang paling sering dirasakan oleh masyarakat.

Tingginya kasus malaria dan batuk pilek berkaitan erat dengan kondisi lingkungan dan pola kehidupan masyarakat. Faktor lingkungan seperti genangan air di sekitar permukiman mendukung berkembangnya nyamuk penyebab malaria, sedangkan paparan debu dan perubahan cuaca berkontribusi terhadap gangguan saluran pernapasan. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang berkelanjutan, baik melalui peningkatan kebersihan lingkungan, penggunaan kelambu, maupun penyuluhan kesehatan kepada masyarakat.

d. Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan

Akses masyarakat Kampung Kaugapa untuk memperoleh layanan kesehatan di Puskesmas Mapurujaya pada umumnya tergolong cukup baik.

Masyarakat dapat menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor, untuk mencapai fasilitas kesehatan tersebut. Ketersediaan pilihan moda transportasi ini memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan, baik untuk pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit, maupun pelayanan kesehatan lainnya yang tidak dapat ditangani di tingkat kampung.

Jarak tempuh dari Kampung Kaugapa menuju Puskesmas Mapurujaya kurang lebih sekitar 1-2 kilometer dan dapat ditempuh melalui jalan darat. Kondisi jalan yang relatif baik memungkinkan perjalanan dengan kendaraan bermotor maupun mobil berlangsung lancar dan tidak memerlukan waktu yang lama. Selain itu, biaya perawatan dan pembelian obat di Puskesmas hingga saat ini masih tergolong terjangkau sebagian besar masyarakat. Kondisi ini menjadi faktor pendukung penting bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan secara optimal dan mendorong upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat kampung.

e. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

Perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat di Kampung Kaugapa masih tergolong sederhana dan belum diterapkan secara konsisten, terutama dalam kebiasaan mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Pemenuhan kebutuhan air bersih umumnya bergantung pada sumur bor milik pribadi maupun fasilitas umum kampung, yang meskipun membantu, masih menghadapi keterbatasan jumlah dan pemeliharaan. Selain itu, meski sebagian besar warga telah memiliki jamban, masih terdapat sebagian kecil masyarakat yang melakukan buang air besar sembarangan di sungai, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.

f. Kesehatan ibu dan anak

Pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kampung Kaugapa pada umumnya telah berjalan cukup baik melalui kegiatan rutin posyandu kampung. Layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan kehamilan *(Antenatal Care/ANC),* pemberian susu bagi ibu hamil, imunisasi, serta pemberian makanan bergizi secara berkala dilaksanakan untuk memantau kondisi kesehatan ibu hamil, balita, dan anak, sekaligus mencegah gangguan kesehatan sejak dini. Posyandu menjadi sarana penting yang mudah dijangkau masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan dasar di tingkat kampung.

Dalam hal persalinan, hampir seluruh ibu hamil di Kampung Kaugapa melahirkan di fasilitas kesehatan. Proses persalinan umumnya dilakukan di Puskesmas Mapurujaya, dan untuk kasus tertentu dirujuk ke rumah sakit di kota. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya persalinan yang aman dan ditangani oleh tenaga kesehatan profesional guna meminimalkan risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.

Meskipun demikian, berdasarkan data lapangan, kasus stunting pada anak dan anemia pada ibu hamil pernah terjadi di Kampung Kaugapa. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, setiap tahun dialokasikan anggaran dana desa khusus untuk pencegahan dan penanganan stunting, disertai pendampingan rutin dari Dinas Kesehatan yang dilakukan satu hingga dua bulan sekali. Upaya terpadu antara pemerintah kampung, tenaga kesehatan dan dinas terkait diharapkan mampu menekan angka stunting dan anemia serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

3. Gizi

a. Akses pangan bergizi

Pola konsumsi pangan masyarakat Kampung Kaugapa mencerminkan perpaduan antara pemanfaatan sumber pangan lokal dan ketergantungan pada bahan pangan dari luar kampung. Konsumsi lauk hewani didominasi oleh ikan sebagai sumber protein utama karena mudah diperoleh dari lingkungan sekitar, baik melalui aktivitas menangkap ikan maupun membeli dari pedagang, sementara ayam, daging, dan telur dikonsumsi secara terbatas sesuai kondisi ekonomi keluarga. Untuk kebutuhan karbohidrat dan sayuran, masyarakat masih mengandalkan pangan lokal seperti sagu, keladi, dan ubi, serta sayuran yang diperoleh dari kebun atau hutan, sehingga ketersediaannya sangat dipengaruhi oleh musim dan hasil alam.

Di sisi lain, masyarakat juga masih bergantung pada beras bantuan dari pemerintah sebagai pelengkap kebutuhan pangan sehari-hari, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia dan keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Penyaluran bantuan beras dan sembako, khususnya bagi lansia di atas 60 tahun, sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar dan meringankan beban ekonomi keluarga, sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Kampung Kaugapa.

b. Program gizi di kampung

Program gizi di Kampung Kaugapa dilaksanakan secara rutin setiap bulan melalui kegiatan posyandu balita sebagai sarana utama pemantauan status gizi anak. Kegiatan ini melibatkan kader posyandu dengan dukungan tenaga kesehatan dari puskesmas, sehingga pertumbuhan dan perkembangan balita dapat dipantau secara berkala dan potensi masalah gizi dapat dideteksi sejak dini.

Selain pemantauan, program gizi juga dilengkapi dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita dan kelompok sasaran lainnya untuk meningkatkan asupan gizi, terutama bagi anak yang berisiko gizi kurang. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan dilakukan setiap bulan sebagai dasar penentuan tindak lanjut, baik berupa edukasi gizi kepada orang tua, pemberian intervensi tambahan, maupun rujukan ke fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan mampu meningkatkan status gizi dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal di Kampung Kaugapa.

c. Perilaku dan pengetahuan gizi keluarga

Cara pengolahan makanan oleh masyarakat Kampung Kaugapa pada umumnya masih dilakukan secara sederhana dan tradisional. Bahan makanan yang tersedia biasanya diolah dengan cara dimasak, direbus, atau dibakar, sesuai dengan kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Metode pengolahan ini dipilih karena mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus, serta menyesuaikan dengan ketersediaan bahan bakar dan peralatan dapur yang ada di rumah tangga. Meskipun sederhana, cara pengolahan tersebut relatif mampu mempertahankan cita rasa alami bahan pangan, khususnya pangan lokal seperti ikan, sagu, umbi-umbian, dan sayuran.

Kebiasaan makan anak-anak di Kampung Kaugapa umumnya tergolong baik dan teratur. Anak-anak biasanya mengonsumsi makanan yang sama dengan anggota keluarga lainnya, dengan menu yang terdiri dari sumber karbohidrat, lauk, dan sayuran. Berdasarkan pengamatan dan keterangan dari kader posyandu, sebagian besar anak tidak menunjukkan gejala kekurangan gizi yang mencolok. Hal ini menunjukkan bahwa pola makan keluarga, meskipun masih sederhana, cukup mendukung kebutuhan gizi anak. Namun demikian, peningkatan variasi menu dan pemahaman tentang pengolahan makanan bergizi seimbang tetap diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas gizi anak secara berkelanjutan.

d. Ketersediaan sumber pangan lokal

Sumber pangan lokal di Kampung Kaugapa tersedia cukup melimpah dan menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Hutan di sekitar kampung menyediakan sagu sebagai sumber pangan utama yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh masyarakat. Sagu tidak hanya berfungsi sebagai bahan pangan pokok, tetapi juga memiliki nilai budaya dan ekonomi bagi keluarga, karena dapat diolah untuk konsumsi sendiri maupun dijual dalam bentuk olahan sederhana.

Selain sagu yang berasal dari hutan, masyarakat Kampung Kaugapa juga memanfaatkan kebun keluarga sebagai sumber pangan harian. Berbagai jenis tanaman seperti ubi, pisang, dan aneka sayuran ditanam di lahan kebun untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Pemanfaatan kebun keluarga ini membantu menjaga ketahanan pangan keluarga, mengurangi ketergantungan pada bahan pangan dari luar kampung, serta mencerminkan kemandirian masyarakat dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia di lingkungan sekitarnya.

4. Keluarga Berencana

a. Pemahaman masyarakat tentang KB

Program Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk mengatur jarak kelahiran, menjaga kesehatan ibu, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu program penting yang dilaksanakan oleh pemerintah. Melalui program ini, keluarga didorong untuk merencanakan jumlah dan jarak kelahiran anak secara lebih teratur agar kesehatan ibu dan anak tetap terjaga serta kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik.

Di Kampung Kaugapa, pandangan adat maupun agama terhadap penggunaan alat kontrasepsi saat ini tidak menjadi hal yang bertentangan. Masyarakat cenderung menerima program KB sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Sikap yang relatif terbuka ini memudahkan pelaksanaan program KB di tingkat kampung dan menjadi modal penting dalam mendukung kesehatan ibu dan anak secara berkelanjutan.

b. Akses layanan KB

Pelayanan dan pemeriksaan KB di Posyandu Kampung Kaugapa telah berjalan, namun pelaksanaannya belum dilakukan secara rutin seperti layanan posyandu untuk ibu hamil, balita dan lansia. Kegiatan KB biasanya dilakukan pada

waktu-waktu tertentu, menyesuaikan dengan jadwal kunjungan petugas kesehatan dari luar kampung. Kondisi ini menyebabkan akses masyarakat terhadap layanan KB belum sepenuhnya optimal, terutama bagi pasangan usia subur yang membutuhkan pelayanan secara berkelanjutan dan terjadwal.

Ketersediaan alat kontrasepsi serta tenaga petugas KB sepenuhnya bergantung pada Puskesmas Mapurujaya yang berada di Distrik Mimika Timur. Petugas KB dari puskesmas tersebut datang ke Kampung Kaugapa untuk memberikan pelayanan, penyuluhan, serta pemasangan alat kontrasepsi ketika kegiatan posyandu dilaksanakan. Ketergantungan pada tenaga dan fasilitas dari luar kampung ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keterbatasan frekuensi pelayanan KB. Untuk itu diperlukan penguatan koordinasi dan peningkatan frekuensi layanan agar program KB dapat berjalan lebih rutin dan menjangkau lebih banyak masyarakat di Kampung Kaugapa.

c. Frekuensi kelahiran dan tren keluarga

Rata-rata jumlah anak dalam setiap keluarga di Kampung Kaugapa berkisar antara dua hingga tiga orang. Pola ini menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga telah menerapkan perencanaan keluarga secara relatif baik, dengan jumlah anak yang tidak terlalu besar dan masih dapat dikelola sesuai dengan kemampuan ekonomi serta kondisi kehidupan keluarga. Jumlah anak tersebut memungkinkan orang tua untuk memberikan perhatian, pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan dasar anak secara lebih optimal.

Selain jumlah anak yang relatif sedang, jarak kelahiran antar anak di Kampung Kaugapa umumnya berkisar antara tiga hingga lima tahun. Jarak kelahiran ini dinilai cukup ideal karena memberikan kesempatan bagi ibu untuk memulihkan kondisi kesehatan setelah melahirkan, sekaligus memungkinkan orang tua mempersiapkan kebutuhan anak berikutnya dengan lebih baik. Pola jarak kelahiran tersebut juga berkontribusi positif terhadap kesehatan ibu dan anak serta mendukung kualitas tumbuh kembang anak dalam lingkungan keluarga.

d. Peran tokoh agama dan adat

Tokoh agama dan tokoh adat di Kampung Kaugapa pada umumnya tidak terlibat secara langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan kontrasepsi KB oleh masyarakat. Keputusan mengenai penggunaan alat kontrasepsi lebih banyak ditentukan oleh pasangan suami istri berdasarkan pertimbangan

pribadi, kondisi keluarga, serta arahan dari tenaga kesehatan. Peran tokoh agama dan adat dalam hal ini cenderung bersifat tidak mengikat dan tidak menjadi faktor penentu utama dalam keputusan ber-KB.

Meskipun demikian, tokoh agama dan adat tetap memberikan nasihat dan dukungan yang bersifat umum, khususnya terkait pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak. Dalam berbagai kesempatan, mereka menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kehidupan yang mendorong keluarga untuk memperhatikan kesejahteraan, keharmonisan rumah tangga, serta tanggungjawab orang tua terhadap anak. Nasihat tersebut secara tidak langsung mendukung tujuan program KB, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak di Kampung Kaugapa.

F. Ekonomi Masyarakat

1. Aktivitas Penduduk

Aktivitas utama penduduk Kampung Kaugapa adalah bertani dan berkebun, yang menjadi tulang punggung perekonomian keluarga maupun kampung secara keseluruhan. Berdasarkan data kampung, hampir sebagian besar penduduk, yaitu sekitar 89 persen, menggantungkan mata pencaharian mereka pada sektor pertanian. Komoditas yang diusahakan umumnya berupa tanaman pangan dan hasil kebun yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan konsumsi keluarga, sekaligus sebagai sumber pendapatan utama. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor pertanian menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Kampung Kaugapa masih sangat erat dengan pemanfaatan sumber daya alam di sekitarnya.

Aktivitas bertani dan berkebun dilakukan secara rutin sebagai pekerjaan sehari-hari dan tidak mengenal musim tertentu. Pengolahan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun. Seluruh anggota keluarga terlibat dalam kegiatan ini, dengan peran utama berada pada kepala keluarga atau suami yang bertanggung jawab mengolah lahan dan pekerjaan fisik di kebun. Sementara itu, istri berperan dalam menjual hasil kebun, baik dengan membawanya ke pasar maupun menjajakan langsung di depan halaman rumah melalui pondok jualan sederhana yang mereka bangun. Pola pembagian peran ini mencerminkan kerja sama dalam keluarga sekaligus menjadi strategi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari.

2. Kepemilikan Modal

Kepemilikan modal produktif yang dimiliki masyarakat Kampung berupa lahan/tanah dan alat pertanian yang sederhana seperti cangkul, parang dan lain-lain. Sebagian kecil masyarakat sudah memiliki mesin babat rumput. Sementara itu untuk sebagian kecil masyarakat pendatang memiliki modal berupa kios.



Kios di kampung Kaugapa (dok.ippm)

Kepemilikan aset rumah tangga seperti motor, mobil, HP, alat elektronik, dan ternak juga tidak dimiliki oleh semua masyarakat. Sumber modal usaha pada umumnya masyarakat masih bergantung pada dukungan pemerintah melalui dukungan dana desa.



Tempat jualan masyarakat (dok.ippm)

Bergantung terus menerus pada pemerintah membuat masyarakat cenderung kehilangan kemandirian dan inisiatif untuk berusaha atau mengembangkan potensi ekonomi sendiri. Motivasi kerja dan kreativitas dapat menurun karena terbiasa menunggu bantuan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan daya saing dan ketahanan ekonomi masyarakat. Selain itu ketergantungan berlebihan berpotensi menimbulkan masalah sosial, seperti kecemburuan, konflik pembagian bantuan, dan penyalahgunaan dana.

3. Kelembagaan Ekonomi

Lembaga ekonomi yang saat ini ada di Kampung Kaugapa adalah koperasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih berada pada tahap pembangunan dan penguatan kelembagaan. Keberadaan BUMDes diharapkan menjadi wadah ekonomi bersama untuk mengelola potensi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung kegiatan ekonomi produktif. Meskipun belum beroperasi secara optimal, inisiatif ini menunjukkan upaya pemerintah kampung dalam mendorong kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pihak luar.

Selain BUMDes, Kampung Kaugapa juga merencanakan pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari program nasional yang dicanangkan oleh Prabowo

Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke tingkat kampung. Kehadiran koperasi ini diharapkan dapat membuka akses permodalan, memperlancar distribusi hasil produksi masyarakat, serta mendorong tumbuhnya usaha-usaha ekonomi lokal, sehingga memperkuat struktur ekonomi kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4. Harga Barang dan Bahan Makanan

Harga barang dan bahan makanan yang ada di kios kios di Kampung Kaugapa relatif stabil dan tidak berbeda jauh dengan harga di Kota Timika. Daftar harga bahan pokok disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Distribusi Harga Bahan Pokok Kampung Kaugapa
Tahun 2025

No.	Bahan Pokok	Harga (Rp)	Keterangan
1.	Beras	13.000 – 20.000	kg
2.	Minyak Goreng	25.000	liter
3.	Gula	20.000	kg
4.	Sayuran	5.000	ikat
5	Bensin	15.000	liter
6	Buah pisang	25.000	sisir
7	Buah salak	20.000	kantong
8	Kopi	2.500	sachet
9	Rokok Surya 12	28.000	bungkus
10	Air mineral 600 ml	5.000	botol

Sumber: Data Primer, 2025

Harga bahan pokok di Kampung Kaugapa relatif sama dengan harga di kampung terdekat dan Kota Mimika karena akses ke kota yang mudah dijangkau melalui jalan darat dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan keadilan ekonomi, karena masyarakat tidak harus membayar lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Daya beli masyarakat menjadi lebih stabil, pengeluaran rumah tangga lebih terkontrol, dan kebutuhan gizi keluarga dapat terpenuhi dengan lebih baik, sekaligus menekan kesenjangan antara kampung dan kota.

Selain itu, kesetaraan harga tersebut memudahkan perencanaan ekonomi keluarga dan mendukung kelancaran distribusi barang. Dari sisi sosial, kondisi ini mengurangi potensi kecemburuan dan ketimpangan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga stabilitas sosial dan kualitas hidup masyarakat Kampung Kaugapa.

5. Potensi dan Peluang Ekonomi

Potensi sumber daya alam Kampung Kaugapa yang paling menonjol meliputi sagu, pisang, dan salak. Hutan sagu yang melimpah menjadi peluang ekonomi yang strategis, dengan harga jual berkisar antara Rp.200.000 - Rp.300.000 per tumang. Pisang juga merupakan komoditas unggulan dengan nilai jual yang cukup tinggi, yakni sekitar Rp.100.000 per tandan atau lebih, tergantung ukuran buah dan jumlah sisir. Selain itu, salak memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan dengan harga jual yang dapat mencapai Rp.200.000 per karung kecil.



Hutan sagu di Kaugapa (dok.ippm)



Kebun Palawija (dok.ippm)

Melimpahnya potensi pangan tersebut membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat, baik melalui penjualan hasil kebun, pengolahan produk lokal, maupun pengembangan usaha ekonomi produktif. Namun demikian, dukungan eksternal, terutama dari pemerintah, sangat dibutuhkan. Masyarakat khususnya mama-mama di Kampung Kaugapa, berharap adanya pembangunan pasar di kampung agar hasil kebun tidak perlu dibawa jauh ke pasar di kota, sehingga biaya distribusi dapat ditekan dan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat dapat meningkat.

6. Tingkat Kesejahteraan

Tingkat pendapatan rumah tangga di Kampung Kaugapa bersifat fluktuatif karena sangat bergantung pada hasil panen kebun, sehingga sulit ditentukan secara pasti setiap bulan. Sebagai contoh, seorang petani pisang bernama Bapak Yohanis menyampaikan bahwa pendapatannya dalam satu bulan dapat mencapai sekitar Rp.3.000.000, namun pada bulan berikutnya bisa meningkat hingga Rp.5.000.000. Selain pendapatan dari hasil kebun, masyarakat pada waktu-waktu tertentu juga memperoleh penghasilan tambahan melalui bantuan pemerintah berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kampung.

Fluktuasi pendapatan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan, serta menyulitkan

keluarga dalam perencanaan keuangan jangka panjang, menabung, maupun berinvestasi. Kondisi ini meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga terhadap risiko gagal panen atau penurunan harga hasil usaha, serta berpotensi menimbulkan tekanan psikologis dan menghambat peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat apabila tidak diimbangi dengan sumber pendapatan alternatif atau perlindungan sosial yang memadai.


Kebun Pisang (dok.ippm)

G. Keamanan dan Ketertiban

1. Kejadian Masalah Keamanan dan Ketertiban

Gangguan keamanan yang sering terjadi di Kampung Kaugapa pada umumnya berkaitan dengan perkelahian yang dipicu oleh konsumsi minuman keras (miras) secara berlebihan. Perkelahian tersebut sebagian besar melibatkan generasi muda yang berada di dalam kampung, namun dalam beberapa kasus juga melibatkan orang-orang dari kampung sekitar yang datang dan berinteraksi dengan warga setempat. Kejadian-kejadian ini tidak terjadi setiap hari, tetapi frekuensinya cenderung meningkat dalam beberapa waktu terakhir, terutama pada malam hari ketika aktivitas pengawasan lingkungan berkurang dan konsumsi miras lebih banyak dilakukan. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat karena berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan kampung.

Dampak dari gangguan keamanan tersebut dirasakan langsung oleh warga masyarakat lainnya. Perkelahian yang terjadi sering menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran, khususnya bagi perempuan, anak-anak dan lansia. Selain itu, warga kerap mengalami kesulitan untuk beristirahat dengan tenang pada malam hari akibat keributan yang terjadi. Dalam beberapa kejadian, rumah warga juga menjadi sasaran kerusakan, baik karena lemparan benda maupun dampak langsung dari perkelahian. Situasi ini tidak hanya mengganggu rasa aman, tetapi juga merusak keharmonisan kehidupan sosial di Kampung Kaugapa, sehingga diperlukan upaya bersama dari pemerintah kampung, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat keamanan untuk menekan peredaran miras serta mencegah terulangnya kejadian serupa.

2. Penanganan Masalah Keamanan dan Ketertiban

Penanganan gangguan keamanan di Kampung Kaugapa pada umumnya diserahkan kepada aparat berwajib, khususnya Kepolisian Sektor (Polsek) Mimika Timur, apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Setiap kejadian perkelahian atau gangguan ketertiban dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kehadiran aparat kepolisian berperan penting dalam meredam konflik, menjaga keamanan, serta mencegah meluasnya gangguan ketertiban di lingkungan kampung.

Selain Polsek Mimika Timur, peran Koramil 1710-07/Mimika Timur juga sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Koramil melaksanakan fungsi pembinaan teritorial melalui pendekatan persuasif kepada masyarakat, termasuk imbauan untuk menjaga ketertiban, menghindari konsumsi minuman keras, serta memperkuat kesadaran dan disiplin sosial, khususnya di kalangan generasi muda. Sinergi antara Polsek Mimika Timur, Koramil 1710-07/Mimika Timur, pemerintah kampung, dan tokoh masyarakat menjadi kunci terciptanya situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif dan berkelanjutan di Kampung Kaugapa.

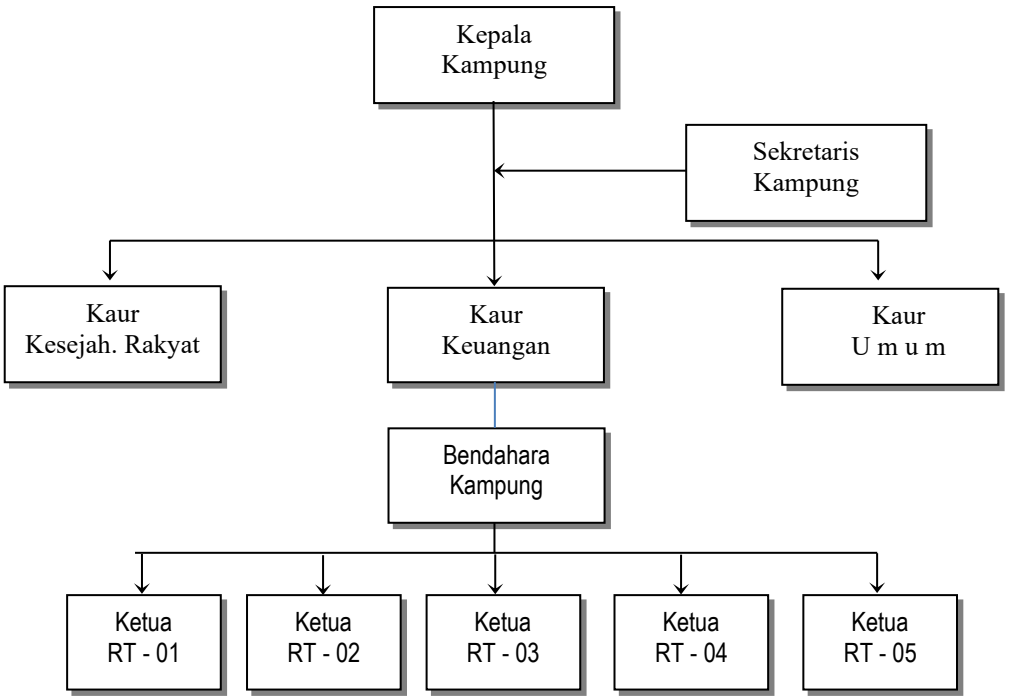
H. Kelembagaan Kampung

1. Lembaga Pemerintah

Struktur Pemerintahan Kampung Kaugapa terdiri atas unsur pimpinan kampung, perangkat kampung, serta ketua rukun tetangga (RT) yang berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kampung. Kepala Kampung dijabat oleh Saverius Kapirapu, didampingi oleh Sekretaris Kampung Bosko Yemaro. Unsur perangkat kampung meliputi Kaur Umum Kristian Inawouw, Kaur Keuangan Vinsen Kapirapu, Kaur Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sapri, serta Bendahara Martha Howay.

Pada tingkat kewilayahan, pemerintahan kampung didukung oleh ketua RT yang terdiri dari RT 01 Fabianus Mametapo, RT 02 Yohanis Epoko, RT 03 Linus Kanareyau, RT 04 Marianus Yaporau, dan RT 05 Yohanis Omaneyau. Struktur pemerintahan ini menjadi tulang punggung dalam koordinasi pelayanan publik, pengelolaan administrasi, serta penyaluran aspirasi masyarakat di Kampung Kaugapa. Struktur Pemerintahan Kampung Kaugapa secara lengkap disajikan pada gambar berikut.

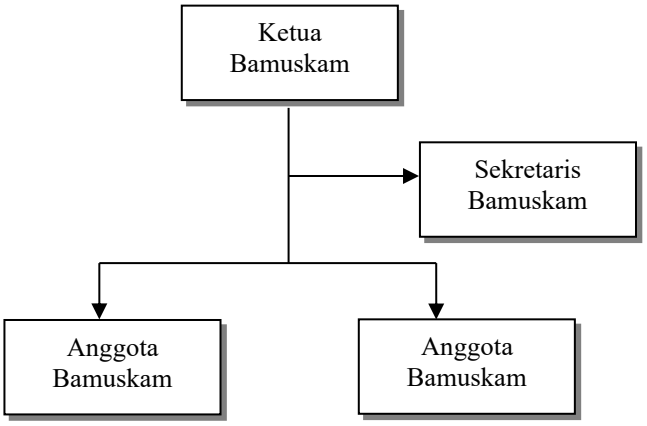
Gambar 3.1. Struktur Pemerintahan Kampung Kaugapa



Selain struktur pemerintahan, Kampung Kaugapa juga memiliki Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi kinerja aparat pemerintah Kampung. Struktur Bamuskam Kampung Kaugapa terdiri dari Ketua (Barthol Kapirapu), Sekretaris (Daniel Yapurau), anggota (Floridus Manukiuta), anggota (Frans Mupiyu).

Struktur Bamuskam Kampung Kaugapa secara lengkap disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3.2 Struktur Bamuskam Kampung Kaugapa



2. Lembaga Kemasyarakatan

Kelembagaan adat di Kampung Kaugapa memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai budaya, norma sosial, serta tatanan kehidupan masyarakat. Lembaga adat ini sebelumnya dipimpin oleh seorang kepala suku, Alowisius Baratowauw (alm), yang wafat pada tahun 2024. Hingga saat ini belum dilakukan pemilihan pengganti kepala suku, sehingga kepemimpinan adat masih bersifat sementara dan dijalankan secara kolektif oleh para tokoh adat yang ada. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya peran kelembagaan adat dalam pengambilan keputusan strategis, meskipun nilai-nilai adat dan kebiasaan masyarakat tetap dijalankan dan dihormati dalam kehidupan sehari-hari.

Selain lembaga adat, kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Kampung Kaugapa juga ditopang oleh keberadaan lembaga keagamaan, yaitu Gereja Katolik Paroki Emanuel Mapurujaya, Gereja Protestan Indonesia (GPI) Imanuel Mapurujaya, serta Masjid Jabal Rahman Kaugapa. Para tokoh agama dari masing-masing lembaga tersebut berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai moral, saling menghormati, dan toleransi antar umat beragama. Mereka juga menekankan pentingnya hidup rukun, tidak memaksakan keyakinan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan sosial yang harmonis.



Gereja Katolik Paroki Emanuel (dok.ippm)



Gereja Protestan Indonesia Imanuel (dok.ippm)



Masjid Jabal Rahman (dok.ippm)

Kolaborasi antara lembaga adat, lembaga keagamaan, dan pemerintah kampung secara umum terjalin dengan baik. Sinergi ini terlihat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan sosial-keagamaan, aktivitas kemasyarakatan, serta upaya menjaga stabilitas sosial dan keamanan kampung. Kerja sama tersebut

memungkinkan pelaksanaan program secara lebih terkoordinasi dan partisipatif, sekaligus menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan sosial, memperkuat persatuan dan menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat Kampung Kaugapa.

3. Lembaga Politik

Lembaga politik hingga saat ini belum memiliki kantor maupun aktivitas yang berlangsung secara langsung di Kampung Kaugapa. Meskipun demikian kondisi tersebut tidak mengurangi partisipasi politik masyarakat. Warga Kampung Kaugapa justru menunjukkan perilaku politik yang cukup matang, yang tercermin dari tingginya tingkat keikutsertaan dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilkada Tahun 2024. Masyarakat hadir dan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab, sehingga mencerminkan meningkatnya kesadaran politik serta komitmen yang kuat terhadap proses demokrasi, khususnya di tingkat lokal.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik juga menunjukkan adanya kepercayaan terhadap mekanisme demokrasi sebagai sarana untuk menentukan arah kepemimpinan dan pembangunan daerah. Sikap ini menjadi modal sosial yang penting bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Kampung Kaugapa ke depan.

I. Sarana dan Prasarana

1. Transportasi dan Komunikasi

a. Akses jalan

Poros jalan Kampung Kaugapa merupakan jalur utama yang memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat Kabupaten Mimika, khususnya sebagai akses menuju Pelabuhan Mimika yang berada di wilayah Poumako. Jalan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh masyarakat Kampung Kaugapa, tetapi juga oleh masyarakat dari wilayah lain yang memiliki kepentingan transportasi dan distribusi barang menuju pelabuhan. Sebagai jalur vital, kondisi jalan saat ini sudah beraspal dengan kualitas yang cukup baik dan memiliki lebar sekitar 4 meter, sehingga dapat dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat dengan lancar. Keberadaan jalan yang memadai ini sangat mendukung kelancaran arus orang dan barang, sekaligus berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di sepanjang jalur tersebut.

Selain akses jalan utama, Kampung Kaugapa juga dilengkapi dengan satu jembatan yang berfungsi menghubungkan wilayah RT 04 dan RT 05 yang terpisah oleh Sungai Wania. Jembatan ini menjadi sarana penghubung yang sangat penting bagi masyarakat, khususnya warga yang bermukim di RT 05. Dengan adanya jembatan tersebut, mobilitas warga menjadi lebih mudah dan aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti bersekolah, berjualan, bertani, serta kegiatan sosial dan ekonomi lainnya. Keberadaan jembatan ini tidak hanya memperlancar akses antar wilayah di dalam kampung, tetapi juga memperkuat keterhubungan sosial dan mendukung pemerataan aktivitas pembangunan di seluruh wilayah Kampung Kaugapa.


Jembatan Sungai Wania (dok.ippm)

b. Moda transportasi

Moda transportasi yang digunakan masyarakat Kampung Kaugapa untuk menjalankan aktivitas sehari-hari umumnya adalah sepeda motor dan mobil pribadi. Kendaraan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pergi bekerja, berkebun, bersekolah, berbelanja, serta mengakses layanan publik di sekitar kampung maupun di wilayah lain. Penggunaan kendaraan pribadi ini dipilih karena dinilai lebih praktis, fleksibel, dan sesuai dengan kondisi jalan yang sudah beraspal serta dapat dilalui dengan baik.

Selain kendaraan pribadi, jalur jalan Kampung Kaugapa juga dilalui oleh berbagai jenis transportasi lainnya. Transportasi umum melintas di jalur ini untuk melayani mobilitas masyarakat antar wilayah. Di samping itu, kendaraan berat seperti truk dan kontainer yang mengangkut barang dari dan menuju pelabuhan juga sering melintasi jalan kampung. Kondisi ini menunjukkan bahwa jalur Kampung Kaugapa memiliki fungsi strategis tidak hanya bagi warga setempat, tetapi juga sebagai bagian dari jalur distribusi barang dan aktivitas ekonomi di wilayah Kabupaten Mimika.


Hatle angkutan umum (dok.ippm)

c. Konektivitas antar kampung dan distrik

Jalan antar Kampung Kaugapa telah terkoneksi dengan baik dengan kampung-kampung di sekitarnya serta ibu kota Distrik Mimika Timur. Konektivitas jalan ini memudahkan mobilitas masyarakat dalam menjalankan berbagai aktivitas, seperti bekerja, berdagang, mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, maupun urusan administrasi pemerintahan. Dengan kondisi jalan yang relatif baik, perjalanan antar wilayah dapat dilakukan secara lancar dan efisien.

Waktu tempuh dari Kampung Kaugapa menuju kampung sekitar maupun ke ibu kota distrik umumnya berkisar antara lima hingga sepuluh menit. Secara umum, tidak terdapat kendala berarti terkait kondisi fisik jalan maupun akses transportasi. Namun demikian sesekali terdapat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang dapat menghambat kelancaran pengguna jalan. Gangguan tersebut biasanya bersifat situasional, namun tetap perlu mendapat perhatian agar akses dan mobilitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman dan nyaman.

d. Transportasi umum

Angkutan umum yang melayani mobilitas masyarakat Kampung Kaugapa tersedia setiap hari dan beroperasi secara rutin mulai pukul 06.00 pagi hingga pukul 19.00 malam. Keberadaan angkutan umum ini sangat membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, seperti pergi bekerja, bersekolah, berbelanja, maupun mengakses berbagai layanan publik di kota dan wilayah sekitarnya. Jam operasional yang cukup panjang memberikan fleksibilitas bagi warga dalam mengatur waktu perjalanan sesuai kebutuhan.



Sarana Transportasi Umum (dok.ippm)

Kendaraan yang digunakan sebagai angkutan umum umumnya berupa mobil jenis Toyota Kijang dan Suzuki APV yang mudah dikenali dengan warna oranye. Rute angkutan ini dimulai dari terminal di kota Timika, kemudian melewati Kampung Kaugapa, dan berakhir di wilayah Pomako. Jalur tersebut menjadikan Kampung Kaugapa sebagai salah satu titik lintasan penting dalam jaringan transportasi darat, sehingga memudahkan masyarakat untuk bepergian ke pusat

kota maupun ke kawasan pelabuhan Pomako tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi.

e. Komunikasi dan telekomunikasi

Kehadiran Telkomsel sebagai penyedia layanan komunikasi dan internet dengan kualitas sinyal yang relatif stabil sangat membantu masyarakat Kampung Kaugapa dalam berkomunikasi dan berinteraksi menggunakan telepon genggam. Akses jaringan yang memadai memungkinkan masyarakat untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, serta mengakses berbagai informasi melalui internet, baik untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, maupun kegiatan ekonomi. Ketersediaan layanan ini juga mempermudah koordinasi antar warga serta komunikasi dengan keluarga yang berada di luar kampung.

Selain layanan seluler, beberapa kios pedagang di Kampung Kaugapa juga menyediakan akses internet melalui fasilitas WiFi publik. Keberadaan WiFi ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang tidak memiliki paket data pribadi atau memiliki keterbatasan biaya untuk membeli kuota internet. Dengan biaya yang relatif murah, masyarakat dapat mengakses internet untuk berbagai keperluan, seperti komunikasi, pembelajaran daring, maupun memperoleh informasi lainnya. Fasilitas ini turut mendukung peningkatan literasi digital dan keterhubungan masyarakat Kampung Kaugapa dengan dunia luar.

2. Air Bersih dan Sanitasi

a. Sumber air bersih

Akses air bersih di Kampung Kaugapa pada umumnya bersumber dari sumur bor yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumur bor tersebut tersedia baik yang dibangun secara mandiri oleh warga maupun yang merupakan bantuan dari pemerintah kampung. Pemerintah kampung telah membangun fasilitas sumur bor di setiap RT agar akses air bersih dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Keberadaan sumur bor ini sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber air alam yang kurang terjamin kebersihannya.

Dalam hal sanitasi, sebagian besar rumah tangga di Kampung Kaugapa telah memiliki fasilitas dasar seperti jamban dan septic tank. Namun demikian, bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi pribadi, pemerintah kampung

telah membangun fasilitas MCK umum di beberapa titik strategis di wilayah kampung. Pembangunan MCK umum ini bertujuan untuk mencegah praktik buang air besar sembarangan, khususnya di sungai atau tempat terbuka lainnya, serta mendorong penerapan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan tersedianya sarana air bersih dan sanitasi tersebut, diharapkan kualitas kesehatan lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat Kampung Kaugapa dapat terus meningkat.

b. Kualitas air

Kualitas air yang berasal dari sumur bor, baik milik masyarakat maupun sumur bor umum di Kampung Kaugapa, pada umumnya terlihat keruh sehingga dinilai tidak layak untuk dikonsumsi sebagai air minum. Air tersebut hanya dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan buang air. Kondisi ini membuat masyarakat tidak menggunakan air sumur bor untuk memasak maupun minum karena dikhawatirkan dapat berdampak pada kesehata

Untuk memenuhi kebutuhan air minum sehari-hari, masyarakat Kampung Kaugapa mengandalkan air galon yang dibeli dari luar kampung. Meskipun memerlukan biaya tambahan, air galon dianggap lebih aman dan layak konsumsi. Adapun sistem distribusi air dari sumur bor dilakukan dengan menggunakan jaringan pipa yang dialirkan langsung ke rumah-rumah warga, serta disalurkan ke bak penampung yang digunakan untuk fasilitas umum. Sistem ini memudahkan akses air bagi masyarakat, meskipun kualitas airnya masih terbatas pada penggunaan non-konsumsi.

c. Sanitasi lingkungan

Sistem sanitasi di Kampung Kaugapa pada umumnya telah tersedia dengan cukup baik. Sebagian besar rumah tangga telah memiliki fasilitas dasar seperti jamban dan septic tank, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) secara layak. Ketersediaan fasilitas sanitasi ini mendukung penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta membantu menjaga kebersihan lingkungan permukiman.

Bagi masyarakat yang belum memiliki fasilitas sanitasi pribadi, pemerintah kampung telah membangun fasilitas MCK umum di beberapa titik strategis di wilayah Kampung Kaugapa. Pembangunan MCK umum ini bertujuan untuk memberikan akses sanitasi yang layak bagi seluruh warga sekaligus mencegah praktik buang air besar sembarangan, terutama di sungai atau tempat terbuka

lainnya. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah kampung dalam meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

d. Pengelolaan sampah

Pengelolaan sampah di Kampung Kaugapa, berdasarkan hasil observasi lapangan, masih dilakukan secara sederhana dan belum terorganisasi dengan baik. Hingga saat ini tidak terlihat adanya fasilitas bak sampah umum maupun Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang dapat digunakan secara bersama oleh masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah terpadu belum tersedia di tingkat kampung.

Dalam praktik sehari-hari, masyarakat umumnya mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibuang dan dibakar di halaman rumah masing-masing. Cara ini dipilih karena dianggap paling mudah dan cepat, meskipun berpotensi menimbulkan dampak terhadap kebersihan lingkungan dan kesehatan, seperti pencemaran udara dan penumpukan sampah tertentu. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kesadaran serta dukungan fasilitas dari pemerintah kampung untuk mendorong pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dari sisi kesehatan, sampah yang menumpuk dapat menjadi sarang nyamuk, lalat, dan tikus yang memicu penyakit seperti diare, demam berdarah, dan penyakit kulit. Dari sisi lingkungan, sampah menyebabkan pencemaran tanah dan air, menimbulkan bau tidak sedap, serta merusak keindahan pekarangan dan lingkungan sekitar. Selain itu, sampah organik dan anorganik yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat resapan air dan meningkatkan risiko genangan.

e. Drainase

Sistem drainase di lingkungan permukiman Kampung Kaugapa pada umumnya belum dibangun secara permanen. Sebagian besar rumah hanya memiliki saluran drainase sederhana berupa galian parit biasa yang berfungsi untuk mengalirkan air hujan ke parit yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa infrastruktur drainase rumah tangga masih sangat terbatas dan belum tertata dengan baik.

Akibat dari drainase yang belum memadai tersebut, Kampung Kaugapa menjadi sangat rawan mengalami genangan air, terutama ketika intensitas hujan

tinggi. Air hujan yang tidak dapat mengalir dengan lancar sering kali menggenangi halaman rumah dan jalan lingkungan, sehingga mengganggu aktivitas masyarakat serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan pembangunan drainase permanen agar aliran air dapat terkelola dengan lebih baik dan risiko genangan dapat dikurangi.

3. Penerangan / Energi

Fasilitas listrik di Kampung Kaugapa seluruhnya bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan telah terdistribusi ke hampir seluruh wilayah permukiman masyarakat. Layanan listrik tersedia selama 24 jam penuh setiap hari dengan kondisi yang relatif stabil, sehingga tidak terdapat kendala berarti terkait pasokan listrik di kampung. Hingga saat ini, tidak pernah terjadi pemadaman listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat, baik pada siang maupun malam hari. Ketersediaan listrik yang andal ini sangat mendukung berbagai aktivitas rumah tangga, kegiatan ekonomi, serta akses informasi dan komunikasi masyarakat.



Fasilitas penerangan Solarcell (dok.ippm)

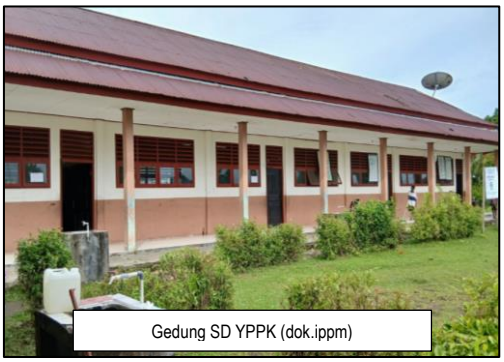
Selain pasokan listrik dari PLN, pemerintah kampung juga telah memasang lampu jalan bertenaga surya (solar cell) di beberapa titik jalan, khususnya di wilayah RT IV, dengan menggunakan bantuan dana desa. Pemasangan lampu jalan ini bertujuan untuk meningkatkan penerangan lingkungan pada malam hari sekaligus mendukung keamanan dan kenyamanan warga. Secara umum, hampir seluruh warga Kampung Kaugapa telah terkoneksi dengan jaringan listrik PLN. Namun demikian, masih terdapat beberapa keluarga yang bermukim agak jauh dari pusat kampung yang hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan akses listrik, sehingga ke depan masih diperlukan upaya pemerataan layanan listrik bagi seluruh masyarakat.

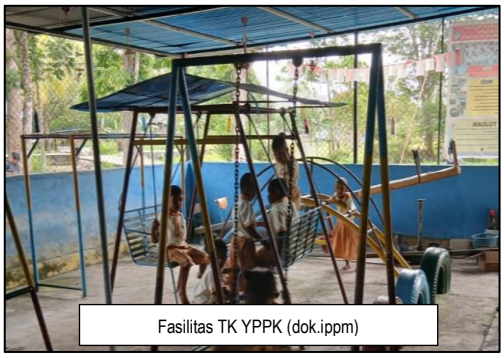
4. Pendidikan

Lembaga pendidikan yang tersedia di Kampung Kaugapa terdiri dari satu TK, SD dan SMP. Keberadaan ketiga jenjang pendidikan ini menjadi sarana penting dalam mendukung akses pendidikan dasar bagi anak-anak di kampung. Gedung belajar TK memiliki tiga ruang kelas yang merupakan bantuan dari pemerintah kampung,

sedangkan pembangunan fasilitas WC/toilet didukung melalui subsidi yayasan serta partisipasi orang tua siswa.

Akses menuju sekolah, baik untuk jenjang TK, SD maupun SMP, tergolong mudah karena seluruh sekolah berada di tengah kampung dan dapat dijangkau oleh anak-anak dengan berjalan kaki. Khusus untuk siswa SMP, sistem pendidikan yang diterapkan adalah pola asrama, sehingga seluruh siswa tinggal di asrama selama hari sekolah. Asrama ini dikelola oleh pihak keuskupan dan tidak hanya menampung siswa dari Kampung Kaugapa, tetapi juga menerima siswa dari kampung-kampung lain yang ingin melanjutkan pendidikan di SMP YPPK Santo Emanuel Kaugapa.


Gedung SD YPPK (dok.ippm)


Fasilitas TK YPPK (dok.ippm)

Sementara itu, ketersediaan sarana penunjang pendidikan di Kampung Kaugapa masih relatif terbatas, terutama dalam hal fasilitas perpustakaan sekolah, alat peraga pembelajaran, dan sarana belajar lainnya. Meskipun demikian, dukungan jaringan internet di sekolah sudah cukup baik berkat layanan Telkomsel. Keberadaan akses internet ini membantu kelancaran administrasi sekolah serta mendukung pelaksanaan pembelajaran berbasis digital, meskipun masih perlu penguatan sarana dan prasarana pendidikan agar kualitas pembelajaran dapat terus ditingkatkan.

5. Kesehatan

Fasilitas kesehatan setara puskesmas atau pustu di Kampung Kaugapa sampai akhir tahun 2025 tidak tersedia. Masyarakat yang ingin berobat karena sakit biasanya dibawa ke Puskesmas Mapurujaya yang berjarak 1,2 km dari pusat balai Kampung Kaugapa atau langsung berobat ke rumah sakit yang ada di Kota Mimika. Satu-satunya fasilitas Kesehatan yang tersedia di Kampung Kaugapa adalah Posyandu yang baru dibangun tahun 2024 untuk melayani


Pelayanan Posyandu Lansia (dok.ippm)

ibu-ibu hamil dan para lansia. Layanan posyandu untuk ibu hamil dan lansia biasa rutin dilakukan sebulan sekali oleh petugas medis dari Puskesmas Mapurujaya.

Tenaga kesehatan yang tersedia secara langsung di Kampung Kaugapa saat ini terbatas pada keberadaan kader posyandu yang berjumlah dua orang. Kader posyandu tersebut direkrut dari masyarakat setempat dan berperan membantu operasional pelayanan posyandu, terutama dalam kegiatan kesehatan dasar seperti penimbangan balita, pencatatan pertumbuhan, pendampingan ibu hamil, serta membantu pelaksanaan imunisasi dan penyuluhan kesehatan.

Akses masyarakat Kampung Kaugapa untuk memperoleh layanan kesehatan di Puskesmas Mapurujaya pada umumnya tergolong cukup baik. Masyarakat dapat menggunakan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi, seperti mobil dan sepeda motor, untuk mencapai fasilitas kesehatan tersebut. Ketersediaan pilihan moda transportasi ini memudahkan masyarakat dalam menjangkau layanan kesehatan, baik untuk pemeriksaan rutin, pengobatan penyakit, maupun pelayanan kesehatan lainnya yang tidak dapat ditangani di tingkat kampung.

6. Ekonomi

Sebagian besar penduduk Kampung Kaugapa, sekitar 89 persen, menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian. Komoditas yang diusahakan berupa tanaman pangan dan hasil kebun yang disesuaikan dengan kondisi lahan serta kebutuhan konsumsi keluarga, sekaligus menjadi sumber pendapatan utama. Tingginya ketergantungan pada sektor pertanian menunjukkan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat masih sangat erat dengan pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kampung.

Di Kampung Kaugapa belum tersedia pasar kampung, sehingga masyarakat sangat bergantung pada pasokan dari luar, terutama dari Kota Timika untuk memenuhi kebutuhan barang rumah tangga, bahan makanan tertentu, serta peralatan elektronik. Meskipun demikian, kebutuhan harian skala kecil masih dapat dipenuhi melalui beberapa kios yang tersedia di kampung. Ketiadaan pasar menyebabkan terbatasnya ruang distribusi hasil pertanian dan interaksi ekonomi lokal.

7. Peribadatan

Tempat ibadah di Kampung Kaugapa terdiri dari satu gereja Katolik, satu gereja Protestan dan satu masjid. Seluruh bangunan tempat ibadah tersebut berada dalam

kondisi layak dan mampu menampung jemaat masing-masing, sehingga dapat digunakan secara nyaman dan aman untuk kegiatan peribadatan rutin masyarakat.

Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan meliputi ibadah hari Minggu bagi umat Kristiani dan ibadah Jumat bagi umat Muslim, serta kegiatan pendukung seperti sekolah Minggu, kelompok doa, dan pembinaan mental rohani. Lembaga keagamaan juga berperan penting dalam memberikan dukungan sosial, pendidikan moral, serta pelaksanaan berbagai kegiatan sosial yang memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian antarwarga.

Keberadaan tempat ibadah yang layak menciptakan suasana ibadah yang khusyuk dan menenangkan, sekaligus menjadi pusat pembinaan moral dan spiritual masyarakat. Selain fungsi keagamaan, tempat ibadah juga berperan sebagai ruang kebersamaan, musyawarah, dan penguatan persatuan. Dalam konteks Kampung Kaugapa, kondisi ini turut mendukung toleransi antar umat beragama, keharmonisan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

8. Olahraga dan Rekreasi

Fasilitas olahraga di Kampung Kaugapa hingga saat ini belum tersedia secara permanen. Namun, pemerintah kampung sedang dalam proses pembangunan lapangan sepak bola sebagai upaya menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap ruang aktivitas olahraga. Pembangunan lapangan ini diharapkan dapat menjadi sarana penyaluran minat dan bakat pemuda, mendorong aktivitas positif, serta mendukung kesehatan dan kebersamaan masyarakat kampung.

Sejalan dengan itu, fasilitas rekreasi juga belum tersedia di Kampung Kaugapa, sehingga masyarakat harus pergi ke luar kampung untuk melakukan kegiatan hiburan atau rekreasi. Meskipun demikian, keterlibatan pemuda dalam kegiatan sosial dan budaya tetap berlangsung, antara lain melalui partisipasi dalam festival tari-tarian di Kota Jayapura. Selain itu, pembuatan rumah adat *karapaopi* menjadi salah satu potensi budaya yang melibatkan masyarakat asli, berfungsi tidak hanya sebagai ekspresi budaya, tetapi juga sebagai sarana penguatan identitas, kebanggaan, dan kohesi sosial masyarakat Kampung Kaugapa.

BAGIAN IV. PRIORITAS PEMBANGUNAN KAMPUNG

A. Infrastruktur Kampung Rasa Kota

Konsep infrastruktur kampung berstandar kota selaras dengan paradigma "membangun dari kampung ke kota", yang menempatkan kampung sebagai fondasi pertumbuhan dengan memperkuat kualitas infrastrukturnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Gagasan membangun kampung rasa kota menjadi wujud praktisnya, yaitu menghadirkan pelayanan, kenyamanan dan aksesibilitas setara perkotaan tanpa menghilangkan identitas sosial, budaya dan kearifan lokal.

Kebutuhan infrastruktur kampung rasa kota di kampung Kaugapa pada tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1 Kebutuhan Infrastruktur Kampung Rasa Kota
Di Kampung Kaugapa

No	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Akses air bersih	Belum semua pemukiman bisa mengakses air bersih	Penambahan fasilitas sumur bor umum	Dinas PUPR
2.	Sanitasi lingkungan	Belum semua pemukiman memiliki jamban dan septic tank yang layak	Penambahan MCK umum dibeberapa titik kampung secara merata	Pemerintah Kampung
3.	Rumah layak huni	- Masih ada Masyarakat yang tinggal dan bermukim di rumah tidak layak huni - kelebihan penghuni per rumah (*overcrowding*)	- Pembangunan rumah layak huni - Pembangunan rumah bersubsidi	Dinas PUPR
4	Akses infrastruktur gedung sekolah	- SMP YPPK Santo Emanuel belum memiliki gedung sendiri - Penambahan ruangan TKK Terang Kristus	Pembangunan Gedung Sekolah SMP YPPK Santo Emanuel dan TKK Terang kristus	Dinas PUPR dan Dinas Pendidikan

Sumber: Hasil FGD,2025

B. Pengembangan Ekonomi Produktif Berbasis Potensi Lokal

Pengembangan ekonomi produktif berbasis potensi lokal menjadi kunci dalam mewujudkan konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu memperkuat aktivitas ekonomi sejak level kampung agar menjadi fondasi pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, potensi unggulan didorong untuk dikelola secara lebih profesional dengan dukungan fasilitas yang setara standar perkotaan mulai dari akses pasar modern, fasilitas penyimpanan layak, hingga pendampingan kelembagaan dan legalitas usaha tanpa menghilangkan identitas budaya dan nilai komunal masyarakat.

Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal di kampung Kaugapa pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan ekonomi produktif berbasis potensi lokal
Di kampung Kaugapa

No	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Pasar tradisional	Kampung Kaugapa tidak memiliki fasilitas pasar tradisional	Pembangunan pasar tradisional	Dinas PUPR
2.	Pabrik pengolahan hasil perkebunan	Potensi lahan pangan lokal melimpah tetapi minim pengetahuan dalam pengolahan	- Penyediaan pabrik pengolahan hasil - pengadaan tenaga pendamping	Dinas Pertanian dan Dinas PMK

Sumber: Hasil FGD, 2025

C. Penguatan SDM, Budaya dan Lingkungan Berkelanjutan

Penguatan SDM, budaya dan lingkungan berkelanjutan merupakan inti dari konsep membangun dari kampung ke kota dan membangun kampung rasa kota, yaitu menghadirkan kualitas hidup modern tanpa meninggalkan jati diri lokal. Melalui peningkatan kapasitas masyarakat, pelestarian nilai budaya, dan pengelolaan lingkungan yang sehat, kampung dapat tumbuh layak, maju dan berdaya saing, namun tetap berakar pada kearifan lokal dan harmoni alam.

Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan di kampung Kaugapa pada tahun 2026 sebagai tabel berikut:

Tabel 4.3 Kebutuhan SDM, budaya, dan lingkungan berkelanjutan
Di kampung Kaugapa

No	Komponen Infrastruktur	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Prioritas	OPD Penanggung Jawab
1.	Peningkatan SDM masyarakat asli	98 % tidak melanjutkan studi ke peguruan tinggi	Pemberian beasiswa untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi	Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kampung
2.	Program kemitraan untuk pencegahan dampak miras	Generasi muda Kampung terpapar miras	- Program kemitraan antara pemerintah, Lembaga adat dan keagamaan untuk pembinaan generasi muda - Penyusunan Peraturan Kampung tentang pelarangan miras	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga. Pemerintah Distrik dan Kampung
3.	Peningkatan SDM aparat kampung	- Pencatatan data kependudukan belum sinkron dengan data Dukcapil - Data kampung tidak lengkap	Pelatihan pendataan kependudukan yang tersistem bagi aparat kampung sampai ke Tingkat RT	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sumber: FGD,2025

BAGIAN V. PENUTUP

Pembangunan Kampung Kaugapa untuk lima tahun ke depan disusun berdasarkan analisis menyeluruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tertuang dalam dokumen profil kampung. Analisis tersebut menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan mendasar, seperti keterbatasan infrastruktur, belum optimalnya layanan dasar, serta ketergantungan pada pola ekonomi subsisten. Kondisi ini menegaskan perlunya arah pembangunan yang lebih terencana, terfokus dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat kampung.

Di sisi lain, Kampung Kaugapa memiliki potensi strategis sebagai modal utama pembangunan, antara lain kekayaan sumber daya alam pesisir, kekuatan budaya Kamoro yang masih terpelihara, serta kohesi sosial masyarakat yang kuat. Potensi ini menjadi aset penting yang dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan kampung yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis kearifan lokal.

Berdasarkan kondisi tersebut, arah pembangunan Kampung Kaugapa difokuskan pada tiga pilar utama, yaitu peningkatan infrastruktur menuju standar perkotaan, penguatan ekonomi produktif berbasis potensi lokal, serta pembangunan sumber daya manusia yang didukung oleh pelestarian budaya dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Setiap program dirancang tidak hanya untuk menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah kampung, lembaga adat, tokoh agama dan berbagai kelompok masyarakat. Partisipasi aktif dan kolaboratif dari seluruh unsur tersebut menjadi kunci agar pembangunan berjalan secara efektif, partisipatif dan selaras dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Kampung Kaugapa.

Dengan tersusunnya dokumen Profil Kampung ini, diharapkan tersedia acuan yang jelas dan terpadu dalam perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan kampung. Pembangunan Kampung Kaugapa diharapkan tidak hanya menghasilkan kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya, menjaga kelestarian lingkungan, serta mewujudkan kampung yang aman, inklusif dan bermartabat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2025). *Kabupaten Mimika dalam Angka Tahun 2024,* Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika

Badan Pusat Statistik. (2025). *Distrik Mimika Timur dalam Angka Tahun 2024,* Kantor BPS Kabupaten Mimika, Timika

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (2025). *Data Agregat Kependudukan (Semester I Tahun 2025).* Dinas Dukcapil, Timika

Republik Indonesia, (2014), *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*